



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024 (LKIP)



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR

Visit our website
<https://bpkad.bogorkab.go.id>



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi melalui Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Bogor ini pula diharapkan adanya optimalisasi dan efisiensi, efektivitas, dan peningkatan produktivitas kinerja pegawai dan pelayanan, sehingga secara keseluruhan mendukung perbaikan dan penyempurnaan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya. Kepada semua pihak atas peran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cibinong, 28 Februari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bogor



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi PD	7
1.5 Peta Proses Bisnis	8
1.6 Struktur Organisasi	9
1.7 Tugas dan Fungsi	13
1.8 Isu Strategis	16
1.9 Sumber Daya Manusia (SDM)	17
1.10 Keadaan Sarana dan Prasarana	23
1.11 Anggaran Tahun 2024	23
1.12 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023	26
1.13 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026.....	28
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	45
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	59
3.1.1 Sasaran Strategis 1	60
3.1.1.1 Ketepatan Penetapan APBD	60

a.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.....	62
b.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	63
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi.....	64
d.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD	65
e.	Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025	66
3.1.1.1	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi.....	66
a.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.....	68
b.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	69
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi.....	70
d.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	72
e.	Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025	73
3.1.2	Sasaran Strategis 2	74
3.1.2.1	Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	74
a.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.....	76
b.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	77
c.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi.....	77
d.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi.....	78

e Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025	80
3.2 Capaian Kinerja dan Keuangan	81
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini	81
3.2.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir.....	91
3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	97
3.2.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun dengan Standar Nasional	108
3.2.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	109
3.2.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	110
3.2.7 Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja.....	111
3.2.8. Kolaborasi lintas sektor.....	113
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	114
3.2.1 Analisis Efisiensi	127
BAB IV PENUTUP	128
4.1 Kesimpulan	128
4.2 Saran	130
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai BPKAD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana s.d Desember 2024.....	18
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur.....	19
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Golongan	19
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan per Desember 2024	20
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu per Desember 2024	21
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai BPKAD yang Mengikuti Perjenjangan s.d Desember 2024.....	22
Tabel 1.7 Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Tahun 2024	23
Tabel 1.8 Pendapatan Daerah BPKAD Tahun 2024	25
Tabel 1.9 Belanja Daerah BPKAD Tahun 2024	25
Tabel 1.10 Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023	26
Tabel 2.1 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis BPKAD Tahun 2019 - 2023.....	30
Tabel 2.2 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis BPKAD Tahun 2024.....	31
Tabel 2.3 Perumusan Indikator Tujuan BPKAD Tahun 2024 – 2026	33
Tabel 2.4 Perumusan Indikator Sasaran BPKAD Tahun 2024 – 2026.....	39
Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40
Tabel 2.6 Perumusan Strategi BPKAD Kabupaten Bogor	43
Tabel 2.7 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026	44
Tabel 2.8 Sasaran, Indikator, dan Target BPKAD pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	45
Tabel 2.9 Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2024.....	51
Tabel 2.10 Anggaran Perubahan Tahun 2024 Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	52

Tabel 2.11 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	58
Tabel 2.12 Anggaran Belanja per Program Utama.....	58
Tabel 3.1 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif	59
Tabel 3.2 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif	58
Tabel 3.3 Realisasi Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2024.....	81
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Tahun 2018-2024.....	92
Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan BPKAD Tahun 2018-2024	95
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah	97
Tabel 3.7 Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024.....	109
Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110
Tabel 3.9 Tabel Rincian Realisasi Belanja BPKAD Ka. Bogor Tahun 2024.....	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Bogor.....	9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	12
Gambar 1.3 Data Kepegawaian	17
Gambar 2.1 Proses Pengelolaan Keuangan Daerah.....	37
Gambar3.1 Capaian dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas.....	60
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	62
Gambar 3.3 Perkembangan Ketepatan Penetapan APBD Tahun 2019-2024...	63
Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.....	63
Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi	64
Gambar 3.6 Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD.....	65
Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	68
Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	37
Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.....	65
Gambar3.10 Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi.....	68
Gambar 3.11Penyesuaian Target Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi.....	73
Gambar 3.12 Capaian 2024 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi.....	74
Gambar 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	76
Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.....	77
Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten	77

Gambar 3.16 Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	79
Gambar 3.17 Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi Tahun 2025.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2023 beserta Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
3. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Ketepatan Penetapan APBD terkait sosialisasi kebijakan dengan contoh evidence berupa "Laporan Hasil Sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025"
4. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi" berupa:
 - Rapat Rancangan Awal Renja Perubahan 2024
 - Rapat Renstra Perubahan
 - Kegiatan Penyusunan RKA 2025
 - Kegiatan Pembahasan LKIP 2023
 - Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024
 - Koordinasi terkait Evidence RB BPKAD 2024
 - Pembahasan Persiapan Penyusunan LPPD BPKAD
 - Rapat Evaluasi Kinerja TW I, II, III, dan IV Tahun 2024
 - Rework dan punishment pada kegiatan Pemeringkatan melalui Aplikasi Siperjaka
5. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi" berupa:
 - Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Rekonsiliasi Data BMD
 - Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Aset
 - Rework dan punishment pada kegiatan Pemeringkatan melalui Aplikasi Siperjaka
6. Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) sebagai inovasi yang mendukung pencapaian Kinerja.
7. Sistem Penilaian Kinerja Keuangan dan Aset (SIPERJAKA) sebagai inovasi yang mendukung pencapaian Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

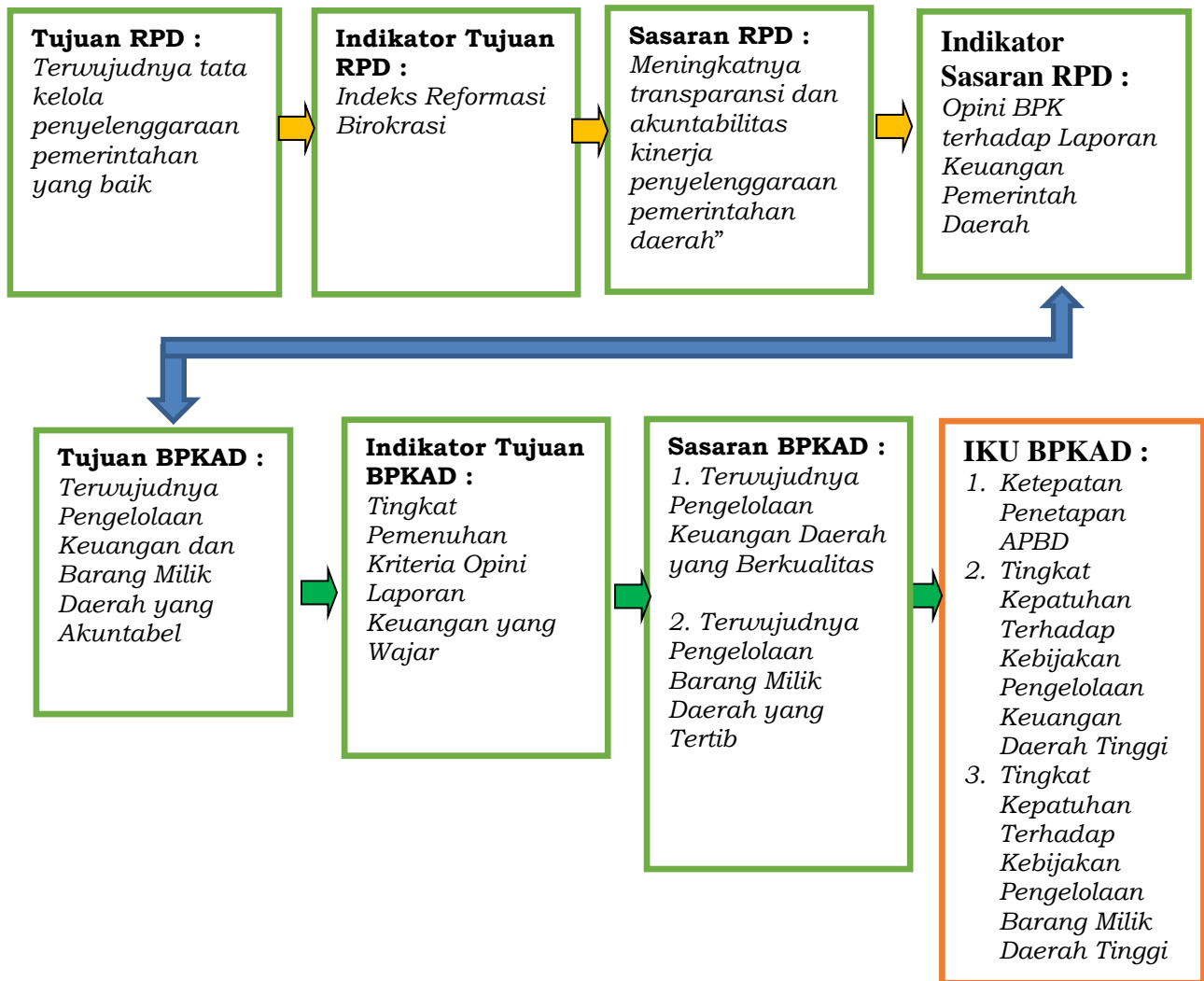
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024.

Dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bogor diwajibkan menyusun dokumen perencanaan tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di saat belum dilantiknya kepala daerah definitif. Dengan demikian, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, huruf c, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah misi ke lima yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota" dengan sasaran Provinsi Jawa Barat yang pertama yaitu "Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel" yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran BPKAD sebagai berikut :

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD



Tujuan Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 adalah *Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik*, dengan **Indikator Tujuan RPD** yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi*.

Adapun **Tujuan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*, dengan **Indikator Tujuan BPKAD** yaitu *Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar*.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah "**Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah**".

Dengan **Indikator Sasaran** yaitu *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;

2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.

Pencapaian sasaran pertama Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

✚ *Ketepatan Penetapan APBD.*

✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian Sasaran yang kedua yaitu Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib, Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi.*

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bogor, dengan indikator termaju yang harus dicapai adalah mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pada tahun 2023 berhasil memperoleh apresiasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama, dan koordinasi secara berkesinambungan dan terintegrasi, dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Bogor.

Capaian dan Realisasi Indeks Kinerja Utama BPKAD diatas dapat diterangkan bahwa:



1. Indikator pertama yaitu "**Ketepatan Penetapan APBD**" dengan target Tepat Waktu pada Tahun 2024 dengan capaian 100 % atau "Tepat Waktu" yaitu pada Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menetapkan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan.

2. Indikator kedua **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi”** Target Tahun 2024 adalah 90.28% Realisasi dihitung berdasarkan persentase dari jumlah SKPD yang telah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dibandingkan dengan jumlah total SKPD yang ada.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah SKPD yang Memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah Total SKPD}} \times 100\%$$

Dalam kasus ini, jumlah SKPD yang memenuhi kriteria adalah 67 dari 72 SKPD, sehingga:

$$\text{Realisasi} = \frac{67}{72} \times 100\% = 93.06\%$$

Capaian merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi yang tercapai dengan target yang ditetapkan, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan realisasi 93.06% dan target 90.28%, maka:

$$\text{Capaian} = \frac{93.06\%}{90.28\%} \times 100\% = 103.8\%$$

Realisasi 93.06% menunjukkan bahwa dari 72 SKPD, 67 SKPD telah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang berarti hampir 93% dari SKPD yang ada berhasil memenuhi kriteria kepatuhan.

Capaian 103.8% menunjukkan bahwa pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan, yakni 90.28%. Hal ini menggambarkan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan, dengan pencapaian lebih dari 100% dari target yang ditetapkan.

Dengan demikian, meskipun tidak seluruh SKPD memenuhi kriteria, namun sebagian besar telah melaksanakannya dengan baik, dan hasil tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik.

3. Indikator yang ketiga **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi”** Target 90,28%. Realisasi dihitung berdasarkan persentase dari jumlah SKPD yang telah mematuhi kebijakan pengelolaan Barang Milik daerah dibandingkan dengan jumlah total SKPD yang ada.



$$\text{Realisasi} = \left(\frac{\text{Jumlah SKPD yang Memenuhi Kepatuhan}}{\text{Jumlah Total SKPD}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \left(\frac{62}{72} \right) \times 100\% = 86.11\%$$

Capaian merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi yang tercapai dengan target yang ditetapkan, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \left(\frac{86.11}{90.28} \right) \times 100\% = 95.38\%$$

Target tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 90.28%. Dari 72 SKPD, sebanyak 62 SKPD telah memenuhi kepatuhan, sehingga realisasi yang diperoleh adalah 86.11%. Dengan menggunakan rumus capaian, diperoleh nilai 95.38%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang dicapai mencapai 95.38% dari target yang telah ditetapkan.

Meskipun realisasi belum mencapai 90.28%, capaian yang diperoleh tetap tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD telah mematuhi kebijakan yang ditetapkan.

Adapun anggaran yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2024 untuk

1. Pendapatan sebesar Rp. 6.651.000.567.141,00 terealisasi sebesar Rp 6.452.240.109.941,00 atau sebesar 97,01% yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 301.950.543.933,00 terealisasi sebesar Rp 202.230.131.189,00 atau sebesar 66.97%
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp 6.349.050.023.208,00 terealisasi sebesar Rp 6.240.272.688.472,00 atau sebesar 98.29%

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Hanya terdapat Pendapatan Hibah sebesar Rp 9.737.290.280,00

2. Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.760.981.431.276,00 dan telah terserap sebesar Rp 1.746.792.485.453,00 atau sebesar 99,19 % dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 54.301.522.417,00 terealisasi sebesar Rp 51.165.953.135,00 atau terserap sebesar 94,23 % sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 3.135.569.282,00 atau sebesar 5,77%, yang berasal dari efisiensi gaji dan tunjangan serta dari tambahan penghasilan.
- Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 9.654.502.689,00 terealisasinya sebesar Rp 9.307.040.644,00 atau terserap sebesar 96,40 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 347.462.045,00 atau sebesar 3,60%;
- Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 34.889.316.695,00 terealisasi sebesar Rp 32.871.783.832,00 atau terserap sebesar 94,22 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.017.532.863,00 atau sebesar 5,78 %;

Anggaran Belanja sebesar Rp 1.760.981.431.276,00 terealisasi sebesar Rp 1.746.792.485.453,00 atau terserap sebesar 99,19 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 8.688.381.633,00 atau sebesar 0,52 % Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh PPTK dalam lingkungan BPKAD Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang daerah.
2. Mempertahankan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor dalam rangkaantisipasi serta mencari solusi pemecahan dari setiap permasalahan yang ada untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Perangkat Daerah. Untuk tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I BERISI :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- 1.5 Peta Proses Bisnis
- 1.6 Struktur Organisasi
- 1.7 Tugas dan Fungsi
- 1.8 Isu Strategis
- 1.9 Sumber Daya Manusia
- 1.10 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.11 Anggaran Tahun 2024
- 1.12 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023
- 1.13 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Penyusunan LKIP dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan LKIP ini juga bertujuan untuk mengukur pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Bogor sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan.

Selain itu, penyusunan LKIP BPKAD Kabupaten Bogor merupakan bagian dari upaya untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya LKIP, diharapkan BPKAD Kabupaten Bogor dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur mengenai kinerja yang telah dicapai serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Penyusunan LKIP ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek akuntabilitas kinerja. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran di masa mendatang.

Dengan demikian, penyusunan LKIP BPKAD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mengukur dan meningkatkan kinerja instansi, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024** bertujuan untuk mendokumentasikan serta menyajikan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor selama tahun anggaran 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan

1. Evaluasi Kinerja

- Menilai sejauh mana capaian indikator kinerja utama (IKU) dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024 BPKAD Kabupaten Bogor.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

- Memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada stakeholders mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik.

3. Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

- Mengidentifikasi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan program kerja guna meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di tahun berikutnya.

4. Pemenuhan Kewajiban Regulasi

- Memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5. Penyusunan Rencana Kerja Tahun Berikutnya

- Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, strategi, dan perencanaan program untuk meningkatkan kinerja BPKAD Kabupaten Bogor di tahun mendatang.

Dengan adanya LKIP ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan LKIP BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2024 adalah sebagai berikut:

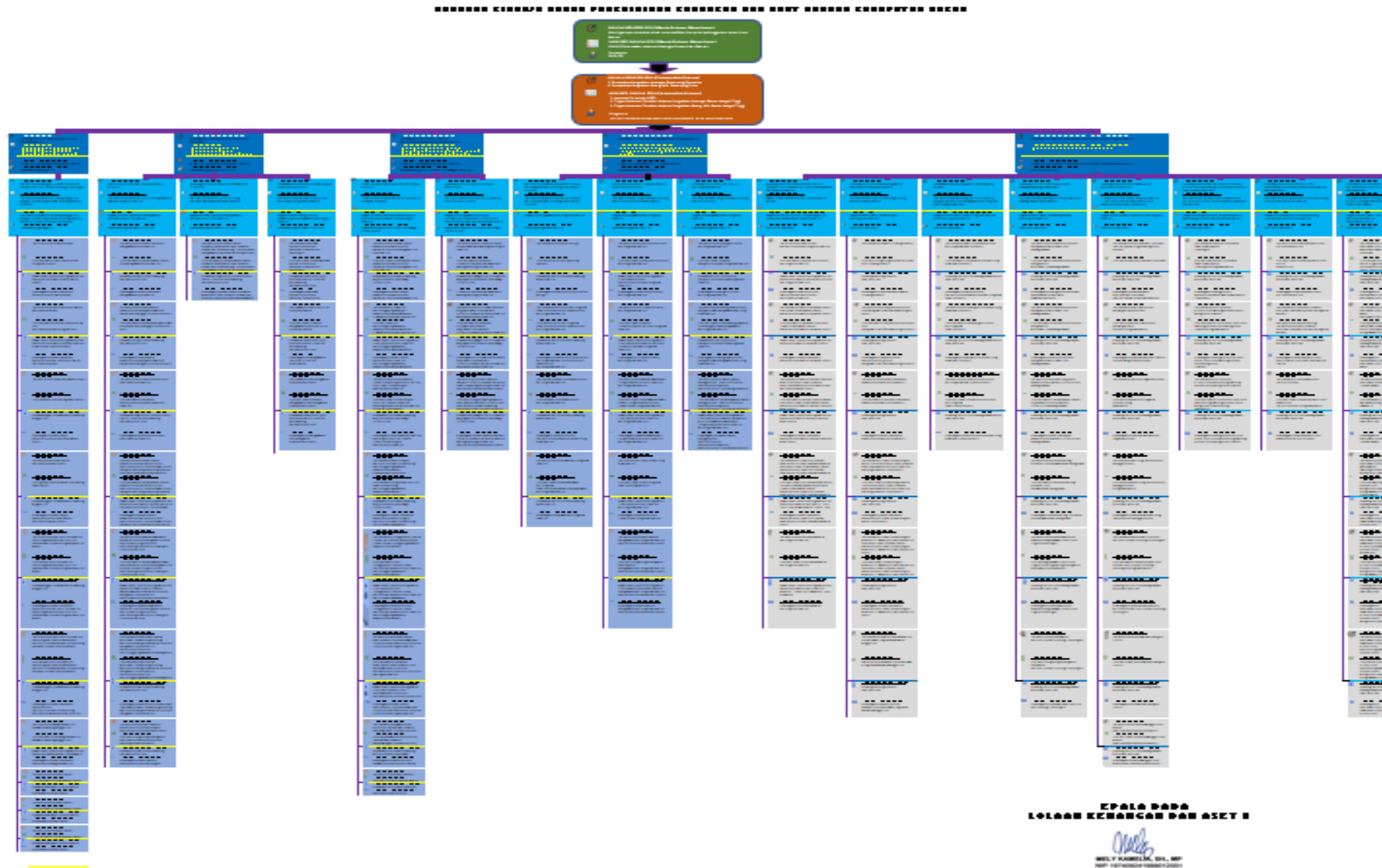
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
 22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 44);
 23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 105);

24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 28);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12).

1.4 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

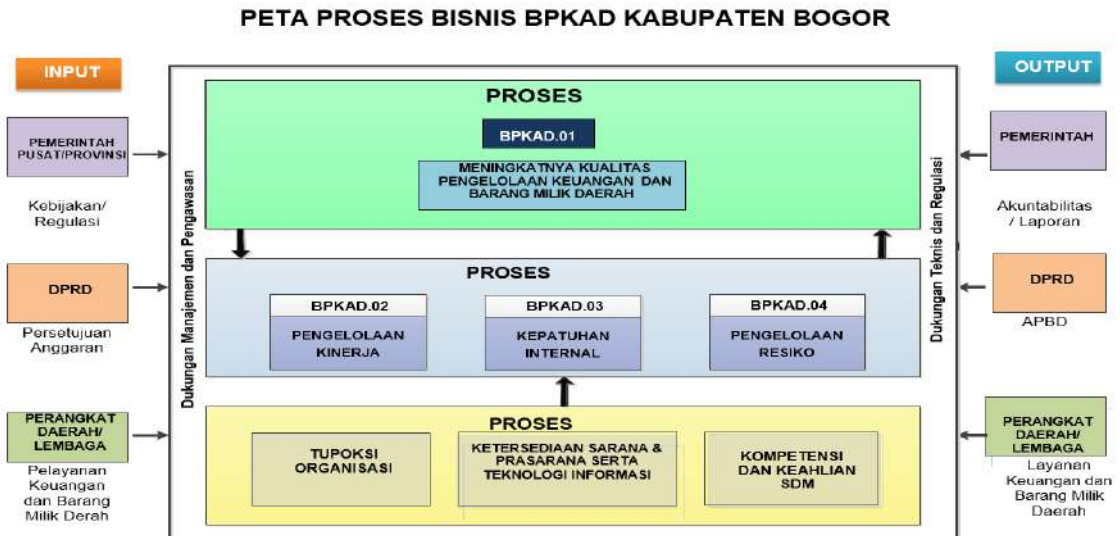


1.5 Peta Proses Bisnis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tentunya tidak lepas dari kelompok sasaran atau mitra dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang terdiri dari unsur :

1. Kementerian
 - ✚ Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIPD dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
 - ✚ Koordinasi dan penyampaian laporan pada Kementerian Keuangan terkait dana perimbangan daerah dan dana transfer.
2. Provinsi Jawa Barat
 - ✚ Koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi Jawa Barat terkait dengan bantuan provinsi (penerimaan dan belanja)
3. DPRD Kabupaten Bogor
 - ✚ Penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengelolaan keuangan daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
 - ✚ Koordinasi dan konsultasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - ✚ Pembinaan dan penyusunan perencanaan anggaran SKPD.
 - ✚ Penatausahaan keuangan SKPD.
 - ✚ Koordinasi terkait rewiu APIP.
5. Lembaga
 - ✚ Koordinasi dengan lembaga perbankan (bjb dan BRI) terkait dengan penyertaan modal sebagai dasar dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah dan pengelolaan kas daerah.
6. Pemerintahan Desa
 - ✚ Penatausahaan bantuan keuangan Pemerintah Desa.

Dalam hal ini sesuai dengan Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Peta Proses Bisnis BPKAD Kabupaten Bogor

1.6 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

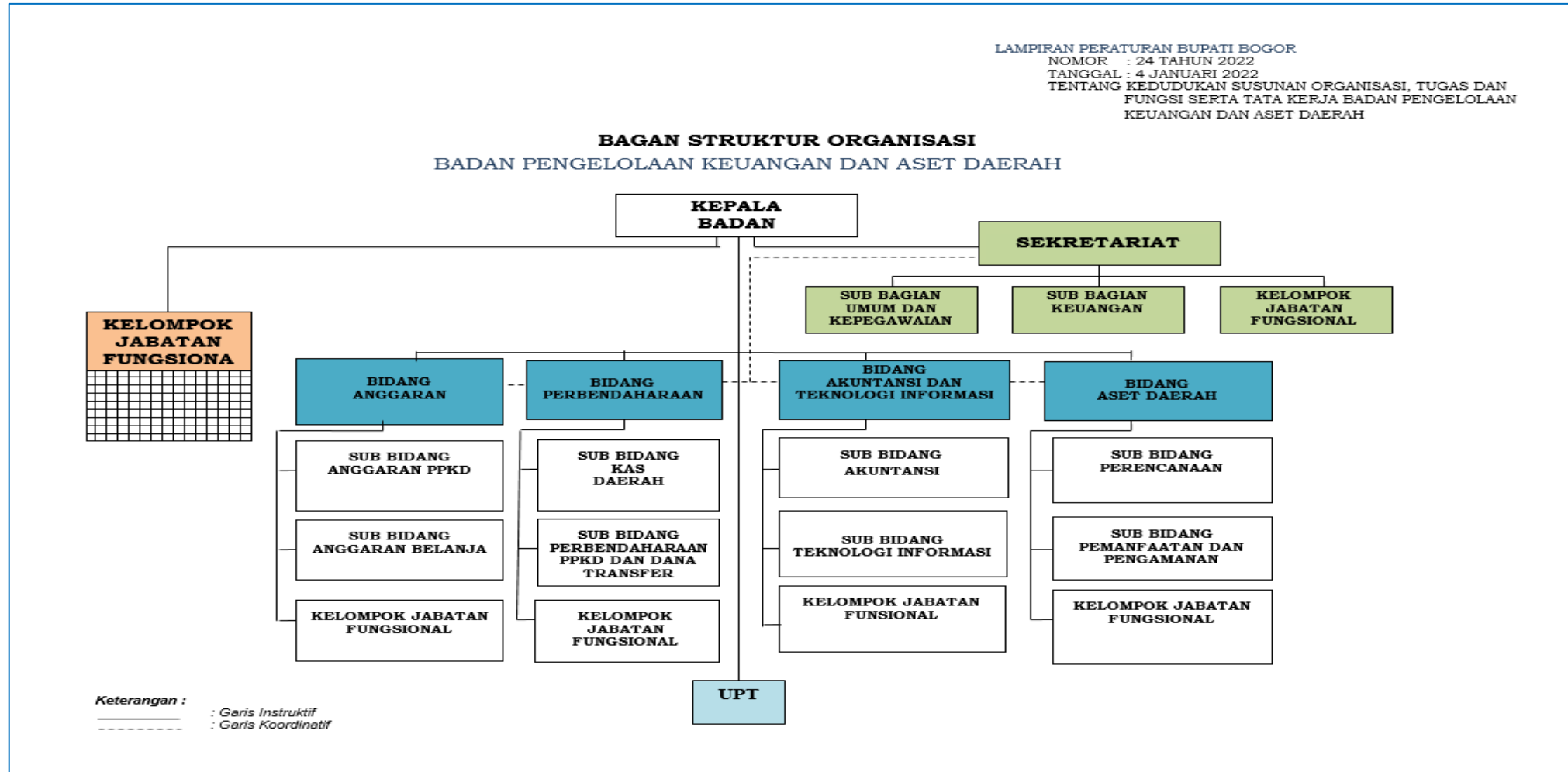
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Anggaran Belanja;
 - b. Sub Bidang Anggaran PPKD; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 1.2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor



Gambar 1.2 Struktur Organisasi

1.7 Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. Pengelolaan keuangan Badan;
- f. Pengelolaan situs web Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- a) Sub Bidang Anggaran PPKD;
- b) Sub Bidang Anggaran Belanja;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kas daerah;
- b. Pengelolaan belanja pegawai;
- c. Pengelolaan anggaran PPKD dan Dana Transfer;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Kas Daerah;
- b) Sub Bidang Perbendaharaan PPKD dan Dana Transfer; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi

Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan akuntansi dan teknologi informasi pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
- b. Pengelolaan pelaporan keuangan daerah; dan
- c. Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Akuntansi;

- b) Sub Bidang Teknologi Informasi: dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a) Sub Bidang Perencanaan;
- b) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24) bahwa pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Namun pada BPKAD tidak dibentuk UPT karena BPKAD memiliki tugas pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, dan setiap kelompok jabatan fungsional akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

1.8 Isu Strategis

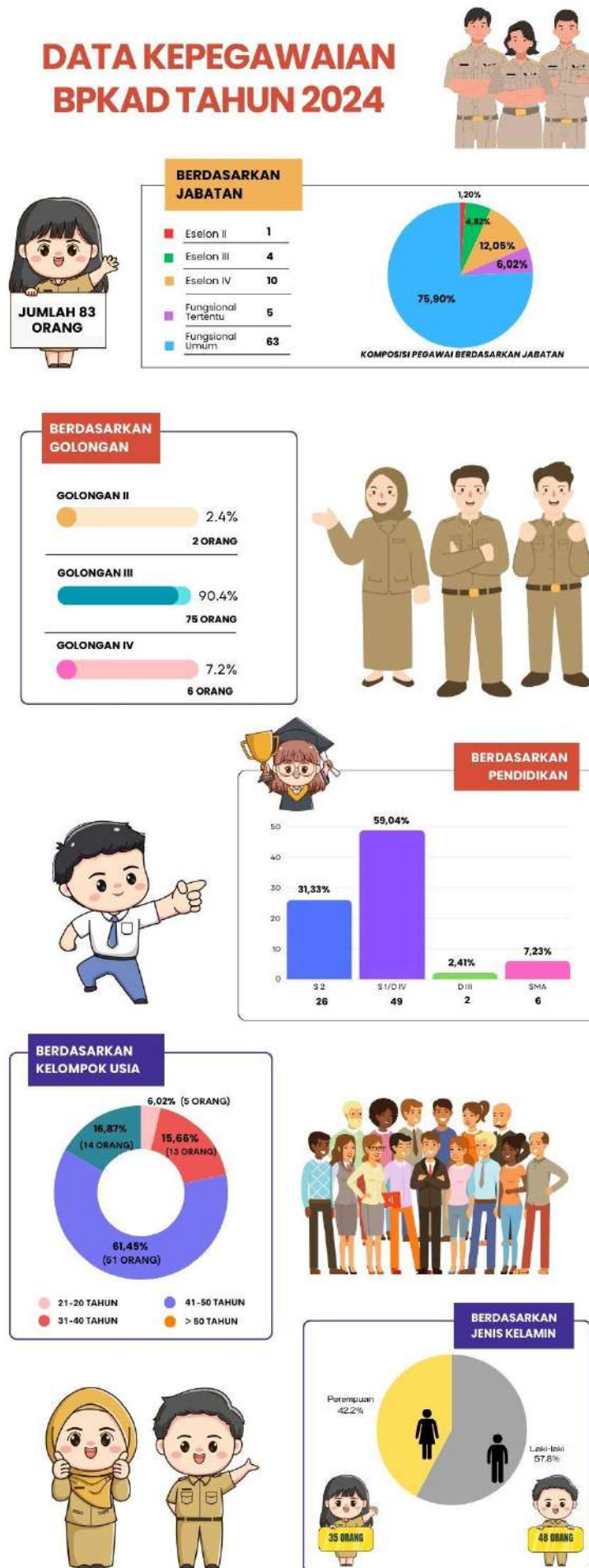
Isu strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor.

Adapun permasalahan dan isu strategis BPKAD pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.9 Sumber Daya Manusia (SDM)



Gambar 1.3 Data Kepegawaian

1. Kondisi Umum Pegawai

Sumber daya Aset utama yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor pada semester I tahun 2024 sebanyak 86 orang. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional dan Fungsional Umum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24), formasi jabatan struktural pada BPKAD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 16 orang (18,60%), Jabatan Fungsional sebanyak 5 orang (5,81%) dan sisanya sebanyak 65 orang (75,58%) adalah fungsional umum. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 1.1 **Jumlah Pegawai BPKAD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana s.d Desember 2024**

No	JABATAN/STAF	JUMLAH (orang)	%
1	Eselon II	1	1,16
2	Eselon III	4	5,81
3	Eselon IV	10	11,63
4	Fungsional	5	5,82
5	Fungsional Umum	63	75,58
	Jumlah	83	100,00

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di kelompok umur >50 tahun yaitu

sebanyak 14 orang, kelompok umur 46-50 sebanyak 27 orang, kelompok umur 41-45 sebanyak 27 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 7 orang, kelompok umur 31-35 sebanyak 6 orang, kelompok umur 26-30 sebanyak 2 orang, dan kelompok umur 20-25 sebanyak 2 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	1				6	8	5	20
2	Bidang Anggaran			1	2	7		1	11
3	Bidang Perbendaharaan		1	1	3	5	9	5	23
4	Bidang Akuntansi	1	1	1	1	3	2	1	10
5	Bidang Aset		1	3	1	5	6	2	19
TOTAL		2	3	6	7	26	25	14	83

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menempati golongan IV sebanyak 6 orang (6,982%), pegawai yang menempati golongan III sebanyak 78 orang (90,70%), dan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 2 orang (2,33%) orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	16	3	20
2	Bidang Anggaran			11		11
3	Bidang Perbendaharaan			22	1	23
4	Bidang Akuntansi		1	7	2	10
5	Bidang Aset			19		19
TOTAL			2	75	6	83

c. Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BPKAD Kabupaten Bogor per Semester I tahun 2024 terdiri dari pegawai dengan

tingkat pendidikan terendah yaitu SLTA/Sederajat dengan komposisi 15,12% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Pasca Sarjana (S-2) dengan komposisi sebesar 31,40%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase terbesar yaitu 52,32%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 komposisinya sebesar 1,16%, dan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/Sederajat dengan komposisi sebesar 0,00%, Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.4 **Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan per Desember 2024**

No	PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)	%
1.	Pasca Sarjana (S-2)	26	31,40
2.	Sarjana (S-1)	49	52,32
3.	Diploma (D-3)	2	1,16
4.	SLTA/Sederajat	6	15,12
5.	SLTP/Sederajat	-	-
	Jumlah	83	100,00

Berdasarkan pendidikan, komposisi pegawai mayoritas berlatar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana yaitu sebesar 83,72% diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Bogor sehingga output yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi lebih baik dan mampu mempertahankan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bogor Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”.

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 32,14% pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana dengan 6 jenis disiplin ilmu sedangkan tingkat pendidikan sarjana sebesar 51,19% terdiri dari 12 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu per Desember 2024

No	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (Orang)	%
A	PASCASARJANA (S-2)		
	1. Magister Manajemen (MM)	12	17,44
	2. Magister Teknik (MT)	-	1,16
	3. Magister Hukum (MH)	2	1,16
	4. Magister Sains (M.Si)	5	6,98
	5. Magister ADM (MA)	5	3,49
	6. Magister Kenotariatan (M.Kn)	1	1,16
	7. Magister Provesional (M.P)	1	
B	SARJANA (S-1)		
	1. Sarjana Ekonomi (SE)	22	19,77
	2. Sarjana Akuntansi (SE.Ak/Ak.)	1	9,30
	3. Sarjana Hukum (SH)	3	4,65
	4. Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)	6	1,16
	5. Sarjana Teknik Komputer (ST)	5	3,49
	6. Sarjana Ilmu Komputer (S.Komp)	3	3,49
	7. Sarjana Sain Terapan Pemerintahan (S.SPT)	1	1,16
	8. Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian (SP)	1	1,16
	9. Sarjana Kehutanan (S.HUT)	1	1,16
	10. Sarjana Administrasi Negara (S.Sos)	4	4,65
	11. Sarjana Sastra Inggris (S.S)	1	1,16
	12. Sarjana (S.IP)	1	1,16
	13. A.Md.Ak	2	1,16
	SLTA/SEDERAJAT	6	15,12
	SLTP/SEDERAJAT	-	-
	JUMLAH	83	100,00

Berdasarkan disiplin ilmu, pegawai BPKAD secara garis besar telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi. Disiplin ilmu pegawai BPKAD yang bervariasi sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor, dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjurangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai di lingkungan BPKAD juga mendapat pelatihan penjurangan maupun non penjurangan. Dari 86 pegawai BPKAD terdapat 0,11% yang telah mengikuti penjurangan Diklat PIM I atau sejenisnya, 4,76% yang mengikuti penjurangan Diklat PIM II atau sejenisnya, 9,52% yang telah mengikuti penjurangan Diklat PIM III atau sejenisnya, 61,90% yang telah mengikuti penjurangan Diklat PIM IV atau sejenisnya, dan sisanya yakni 23,81% belum mengikuti Diklat Penjurangan seperti yang disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai BPKAD yang Mengikuti Penjurangan s.d Desember 2024

No	DIKLAT PENJURANGAN	JUMLAH (orang)	%
1.	Diklat PIM I		
2.	Diklat PIM II	1	4,76
3.	Spama/Diklat PIM III	2	9,52
4.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	13	61,90
5.	Belum Mengikuti Diklat Penjurangan	5	23,81
	Jumlah	21	100,00

1.10 Keadaan Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor cukup memadai, namun belum optimal karena adanya kondisi barang kurang baik (KB) dan rusak berat (RB) hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
**Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Tahun 2024**

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	KONDISI		
				B	KB	RB
I	TANAH					
1	Tanah Darat P 94 m x L 42,20 m	3.966,80	m2	v		
II	BANGUNAN					
1	Gedung Kantor Dinas 1	1,620	m2	v		
2	Gedung Kantor Dinas 2 (AKTI)	700,4	m2	v		
3	Gedung Kantor Dinas 3 (Sekret)	820	m2	v		
4	Gedung Gudang BPKAD	872	m2		v	
5	Mushola	40	m2	v		
6	Rumah Genset 1	8	m2	v		
7	Rumah Genset 2	10	m2	v		
8	Lahan Tempat Parkir	2	Tempat	v		
9	Pos Keamanan 1	20	m2	v		
10	Pos Keamanan 2	2,25	m2		v	
11	Halaman Kantor	881.620	m2		v	

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	KONDISI		
				B	KB	RB
III	INVENTARIS LAINNYA					
12	Listrik	2	Jaringan	2		
13	Telepon dan Fax	1	Jaringan			1
14	PAM Air	1	Jaringan	1		
15	Ruang Rapat	4	Ruang	4		
16	Kendaraan Roda 6	1	unit	1		
17	Kendaraan Roda 4	25	unit	12	13	
18	Kendaraan Roda 2	40	unit	26	12	1
19	AC	68	unit	45	12	11
20	Komputer PC	150	unit	92	43	15
21	Komputer Notebook	58	unit	30	8	20
22	Printer	123	unit	85		38
23	Printonik	1	unit		1	
24	Meja Kerja	84	buah	48	2	34
25	Meja Rapat	110	buah	94	3	8
26	Kursi Kerja	158	buah	146	6	6
27	Kursi Rapat	360	buah	350	6	4
28	Filling Kabinet	8	buah	3	3	2
29	Rak Arsip	604	buah	540	58	6
30	Proyektor	12	unit	8	3	1
31	Jaringan Internet	2	Line	1	1	
32	Area Taman luar	1	Area		1	
33	Lemari arsip/besi	11	buah	6	5	1
34	Faximili	2	unit		1	1
35	Lemari Kaca sorok	13	buah	6	2	5
36	Sound System	3	unit	2		1
37	Kursi Tamu/sofa	19	buah	14	5	
38	Papan tulis elektrik	1	unit	1		
39	Pesawat Telepon	10	unit		5	5
40	Rak Kayu	11	buah		11	
41	Televisi	18	unit	16	1	1
42	Whiteboard	3	buah	1	1	1
43	Wireles	5	unit		2	3
44	Camera	3	unit		2	1
45	Mesin Tik	2	unit		2	
46	Handycam	3	buah	1	1	1
47	Handkey	4	unit		2	2
49	Kubikal	35	Set	30	5	
50	CCTV	30	unit	20	10	
51	Penghancur Kertas	8	unit	5	3	
52	Tabung Pemadam Kebakaran	20	unit	18	2	
53	Genset Merk Perkin 80 KVA	1	unit	1		
54	Genset Merk Highlander 80 KVA	1	unit	1		

1.11 Anggaran Tahun 2024

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Bogor.

Alokasi Anggaran Perubahan diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah BPKAD per 31 Desember 2024

Tabel 1.8 PENDAPATAN DAERAH BPKAD TAHUN 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
	PENDAPATAN DAERAH	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	301.950.543.933,00
	PENDAPATAN TRANSFER	6.349.050.023.208,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	6.651.000.567.141,00

Tabel 1.9 BELANJA DAERAH BPKAD TAHUN 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
	BELANJA DAERAH	
	BELANJA OPERASI	54.301.522.417,00
	BELANJA MODAL	9.654.502.689,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.889.316.695,00
	BELANJA TRANSFER	1.662.136.089.475,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.760.981.431.276,00

1.12 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Berikut ini merupakan tindaklanjut saran / rekomendasi berdasarkan Surat Inpektorat Kabupaten Bogor Nomor 700.1.2/123/itban/II/2024 I Tanggal 8 Mei 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset atas SAKIP Tahun 2023

Tabel 1.10 Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

NO	Hasil Evaluasi Per Komponen AKIP 2023	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Memerintahkan Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang agar secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap realisasi capaian kinerja serta mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membuat surat perintah Kepala BPKAD 2 Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap realisasi capaian kinerja 3 Mendokumentasikan kegiatan
2	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Memerintahkan Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang agar secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemutahiran rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan evaluasi internal terhadap realisasi capaian kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membuat surat perintah Kepala BPKAD
3	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1 Membuat surat perintah Kepala BPKAD 2 Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

Terlampir Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2023 beserta Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.

1.13 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2024 disusun sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif yang berisi penjelasan capaian indikator sasaran.

2. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Penjelasan umum Organisasi antara lain Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Sumber daya, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan dan Sistematika LAKIP.

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Anggaran Tahun 2024.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi capaian kinerja tahun 2024 dan realisasi anggaran Tahun 2024 disertai dengan beberapa perbandingan antara target dan realisasi kinerja.

5. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

6. LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II BERISI :

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026
 - 2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran;
 - 2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024;
 - 2.3.1 Target Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 dan memenuhi Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terutama dalam hal substansi program, indikator, dan target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercakup dalam substansi Perubahan RPJMD.

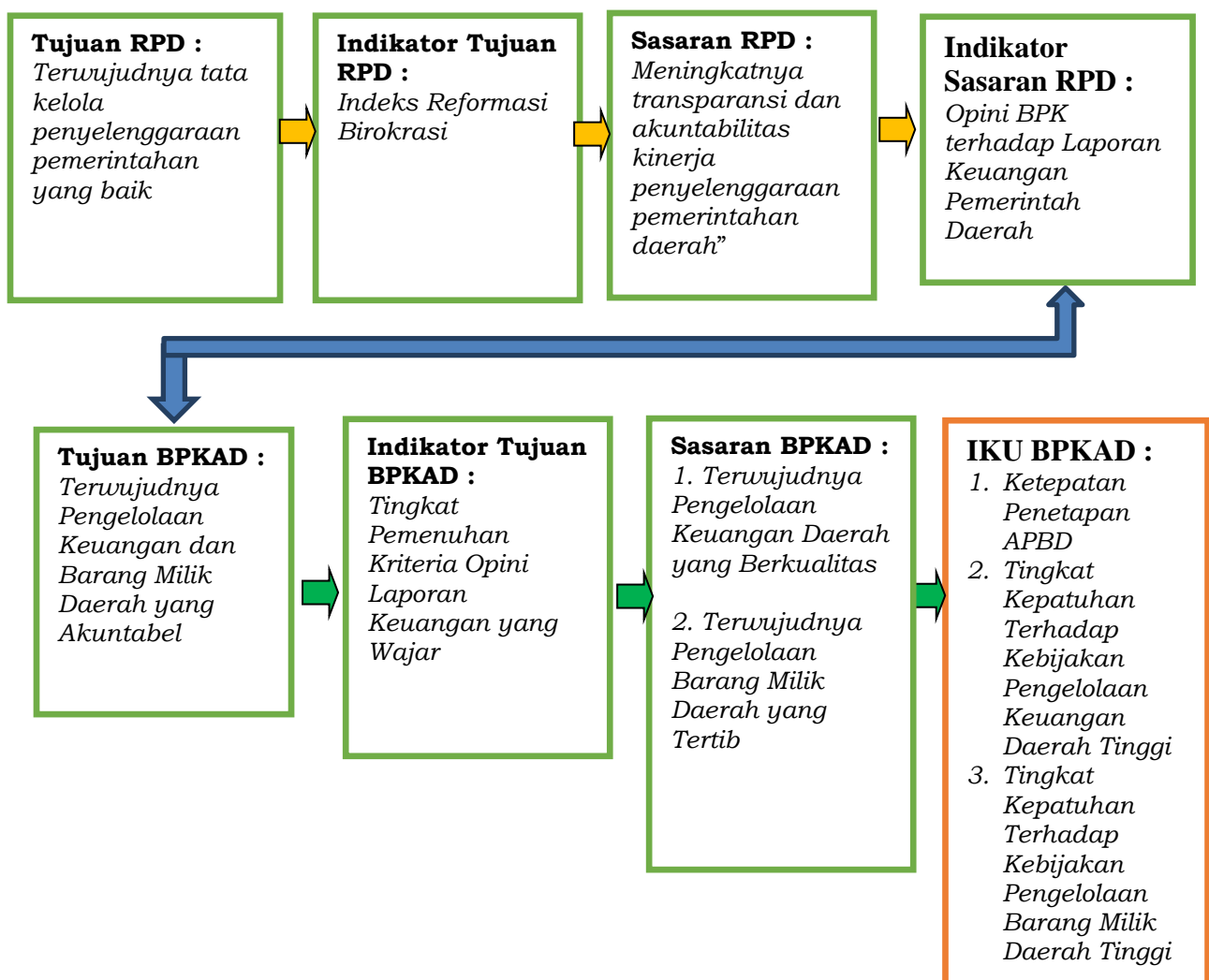
Diantara Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada Perubahan RPJMD 2018-2023 salah satunya adalah *Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* dengan target *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*. Untuk mewujudkan tercapainya WTP, adalah menyusun laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24}, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPKAD dapat disajikan pada bagan sebagai berikut :

Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor



Tujuan Pemerintah Daerah sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 adalah *Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik*, dengan **Indikator Tujuan RPD** yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi*.

Adapun **Tujuan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*, dengan **Indikator**

Tujuan BPKAD yaitu *Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar*.

Dalam upaya merealisasikan good governance, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bogor. Indikator yang harus dicapai, yaitu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi nya telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berhasil memperoleh apresiasi dalam penyajian laporan keuangan yaitu opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pencapaian ini merupakan hasil dari Kerjasama, dan Koordinasi secara berkesinambungan dan terintegrasi, dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Bogor.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;**
2. **Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib.**

Adapun Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama BPKAD pada Rencana Strategis BPKAD tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis BPKAD Tahun 2019 - 2023

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas di Perangkat Daerah	- Ketepatan Penetapan APBD	100% Tepat Waktu	100% Tepat Waktu	100% Tepat Waktu	100% Tepat Waktu	100% Tepat Waktu
	- Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	- Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan RENSTRA 2024-2026 Indikator dari Sasaram Kinerja BPKAD terdapat perubahan dalam Kalimat indikator tersebut sehingga tidak dapat disandingkan dengan Target Sasaran Indikator Tahun sebelumnya. Adapun Target Indikator Kinerja Utama BPKAD pada Rencana Strategis BPKAD tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2 Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis BPKAD Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target
		2024
1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas di Perangkat Daerah	- Ketepatan Penetapan APBD	100% Tepat Waktu
	- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	90.28%
2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	90.28%

Adapun Realisasi Indeks Kinerja Utama (IKU) BPKAD diatas dapat diterangkan bahwa:

- Indikator pertama yaitu **“Ketepatan Penetapan APBD”** dengan target Tepat Waktu pada Tahun 2024 dengan capaian 100 % atau “Tepat Waktu” yaitu pada Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menetapkan APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan.
- Indikator kedua **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi”** Target Tahun 2024 adalah 90.28% Realisasi dihitung berdasarkan persentase dari jumlah SKPD yang telah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dibandingkan dengan jumlah total SKPD yang ada.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah SKPD yang Memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah Total SKPD}} \times 100\%$$

Dalam kasus ini, jumlah SKPD yang memenuhi kriteria adalah 67 dari 72 SKPD, sehingga:

$$\text{Realisasi} = \frac{67}{72} \times 100\% = 93.06\%$$

Capaian merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi yang tercapai dengan target yang ditetapkan, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan realisasi 93.06% dan target 90.28%, maka:

$$\text{Capaian} = \frac{93.06\%}{90.28\%} \times 100\% = 103.8\%$$

Realisasi 93.06% menunjukkan bahwa dari 72 SKPD, 67 SKPD telah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang berarti hampir 93% dari SKPD yang ada berhasil memenuhi kriteria kepatuhan.

Capaian 103.8% menunjukkan bahwa pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan, yakni 90.28%. Hal ini menggambarkan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan, dengan pencapaian lebih dari 100% dari target yang ditetapkan.

Dengan demikian, meskipun tidak seluruh SKPD memenuhi kriteria, namun sebagian besar telah melaksanakannya dengan baik, dan hasil tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik.

- Indikator yang ketiga **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi ”** Target 90,28%. Realisasi dihitung berdasarkan persentase dari jumlah SKPD yang telah mematuhi kebijakan pengelolaan Barang Milik daerah dibandingkan dengan jumlah total SKPD yang ada.

$$\text{Realisasi} = \left(\frac{\text{Jumlah SKPD yang Memenuhi Kepatuhan}}{\text{Jumlah Total SKPD}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \left(\frac{62}{72} \right) \times 100\% = 86.11\%$$

Capaian merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi yang tercapai dengan target yang ditetapkan, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \left(\frac{86.11}{90.28} \right) \times 100\% = 95.38\%$$

Target tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 90.28%. Dari 72 SKPD, sebanyak 62 SKPD telah memenuhi kepatuhan, sehingga realisasi yang diperoleh adalah 86.11%. Dengan menggunakan rumus capaian, diperoleh nilai 95.38%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang dicapai mencapai 95.38% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi belum mencapai 90.28%, capaian yang diperoleh tetap tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD telah mematuhi kebijakan yang ditetapkan.

2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran;

a. Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang terkait dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor adalah *Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.*

Sedangkan **Tujuan** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang akan dicapai dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024-2026 adalah *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel* dengan **indikator tujuan** *Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar.*

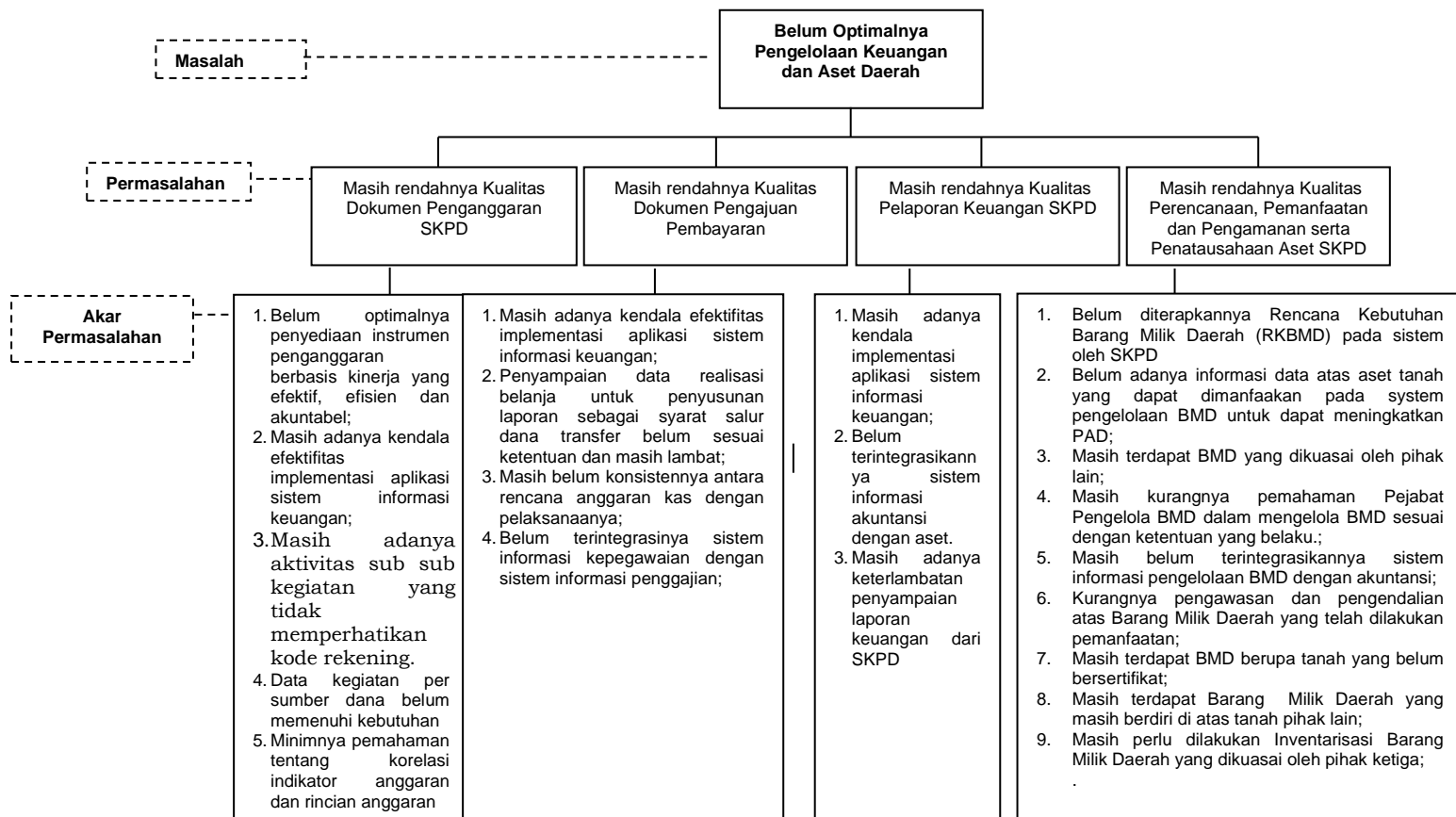
Pencapaian tujuan BPKAD dapat diukur dengan pemenuhan indikator dibawah ini :

Tabel 2.3
Perumusan Indikator Tujuan BPKAD Tahun 2024 – 2026

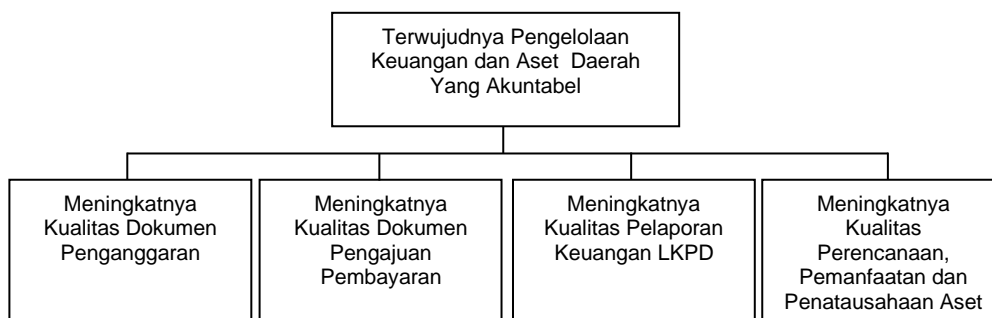
NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	Keterpenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar : 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. efektifitas sistem pengendalian intern	Kriteria	4	4	4

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun sasaran yang ingin dicapai tersebut adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas”** dan **“Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib”**

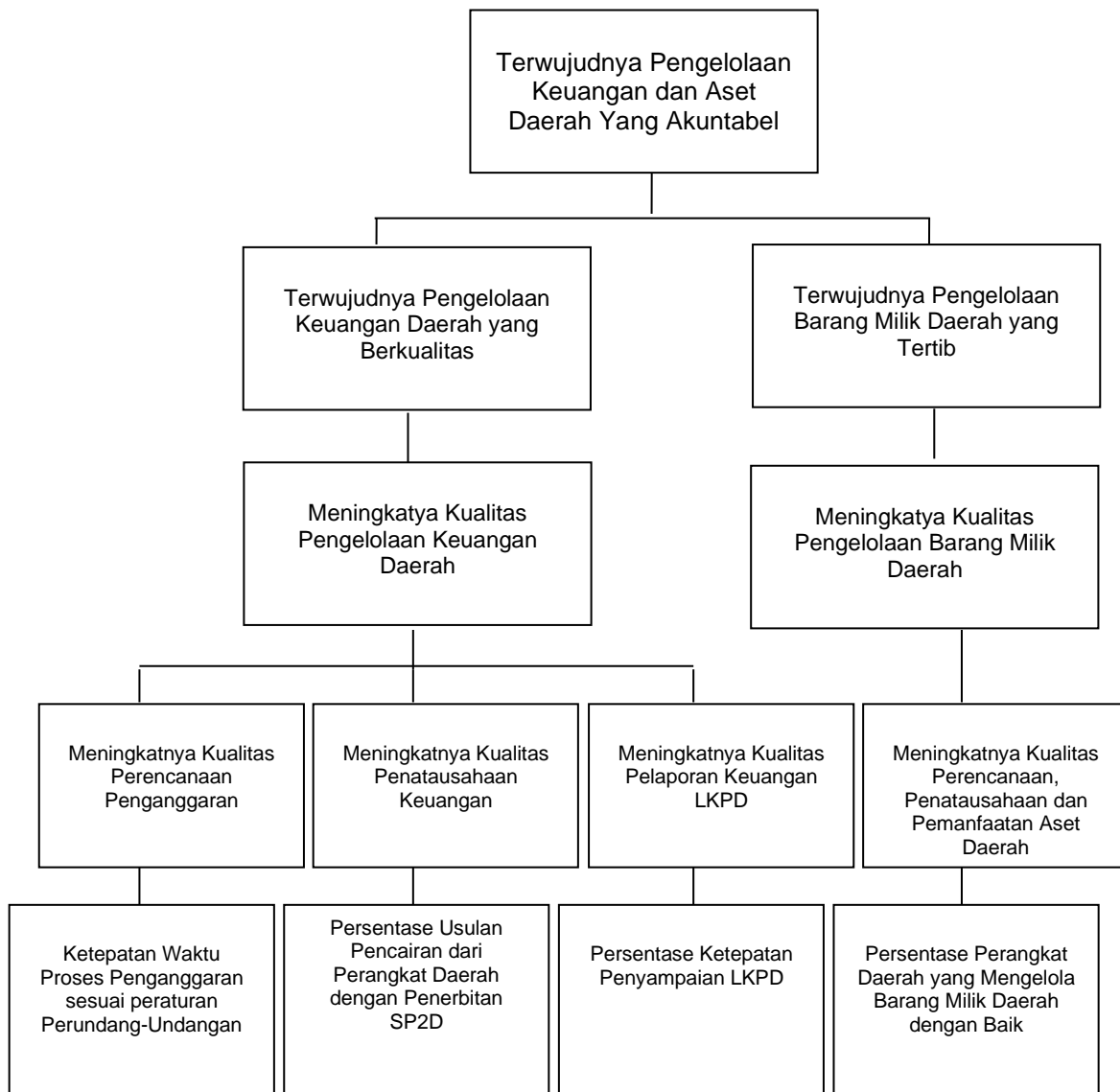
Analisa Pohon Masalah



Analisa Pohon Tujuan



Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



b. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor



Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. **sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”, dengan Indikator Sasaran Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas;

Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. **Pertanggungjawaban** yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses **manajerial**, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat **pengawas** fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar, Hal ini tak lepas dari **berkualitasnya** Laporan keuangan yang di sajikan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.

Pencapaian sasaran *Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator sebagai berikut :

-  *Ketepatan Penetapan APBD.*
-  *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Gambar 2.1 Proses Pengelolaan Keuangan Daerah



2. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib

Pengelolaan asset atau barang milik daerah sebagaimana pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Fungsi dari pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:

- a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- c. Pengamanan aset daerah dan;
- d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan pengelolaan aset yang baik, pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun kebijakan pengelolaan aset pada setiap tahapannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka BPKAD akan mendorong agar Perangkat Daerah dapat mematuhi kebijakan pengelolaan aset daerah sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi tertib.

Pencapaian Sasaran *Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib*, diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) atau indikator yaitu :

✚ *Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pencapaian **Sasaran** BPKAD Kabupaten Bogor dapat diukur dengan pemenuhan indikator dibawah ini :

Tabel 2.4
Perumusan Indikator Sasaran BPKAD Tahun 2024 – 2026

NO		INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Ketepatan penetapan penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah/Perangkat Daerah x 100	%	90	91	92
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah/Perangkat Daerah x 100	%	90	91	92

Pencapaian Sasaran Penunjang Meningkatnya Tata Kelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Bersih, dan Efektif.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator yaitu :

🚩 *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 79.78 Poin, tahun 2025 sebesar 79,79 Poin, dan tahun 2026 sebesar 79.80 Poin.*

Target indikator ini akan dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun **tujuan** dan **sasaran** pelayanan BPKAD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini:

Tabel 2.5

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	CARA PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN			
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Tingkat Pemenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar	Keterpenuhan Kriteria Opini Laporan Keuangan yang Wajar : 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. efektifitas sistem pengendalian intern	Kriteria	4	4	4	
		1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1. Ketepatan Penetapan APBD	Ketepatan penetapan penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi tahun berjalan	Tepat /Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
				2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah/Perangkat Daerah x 100	%	90	91	92
		2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	Jumlah kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah/Perangkat Daerah x 100	%	90	91	92

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan ilmu, seni, langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan konsisten. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam melakukan perumusan strategi yang akan dilakukan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor memperhatikan kekuatan internal yang sudah ada seperti posisi organisasi yang lebih baik, pemanfaatan sistem informasi, peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur BPKAD. Selain itu, BPKAD juga dapat memanfaatkan peluang yang ada agar dapat dimanfaatkan sebagai dukungan bagi BPKAD dalam melaksanakan tupoksinya seperti peran BPKAD yang strategis, mudah berkoordinasi dengan pusat, kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan, komitmen pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah dan potensi asset daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian selain memanfaatkan kekuatan dan peluang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor juga akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti :

1. Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan ATISISBADA disetiap Perangkat Daerah belum optimal;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi personil Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum memadai;
3. Belum optimalnya penyediaan instrumen penganggaran berbasis

- kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
4. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
 5. Masih adanya aset di Perangkat daerah yang belum dioptimalkan;
 6. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;
 7. Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) mengenai penyusunan anggaran dan pengelolaan aset yang belum jelas;
 8. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah;
 9. Belum tegasnya sanksi terhadap kelalaian dalam jual beli aset daerah;
 10. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset - aset bermasalah.

Kedepan, BPKAD juga harus dapat menjawab tantangan yang ada seperti :

1. Profesionalisme dan integritas SDM pengelola keuangan dan aset masih perlu ditingkatkan;
2. Penerapan teknologi informasi (aplikasi) belum terintegrasi;
3. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat;
4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah;
5. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatnya jumlah paket pengadaan barang dan jasa;
6. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance;
7. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;
8. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
9. Fasilitas pengelola barang yang belum memadai;
10. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa;
11. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

Strategi sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, namun perlu dijabarkan lebih terinci dalam arah kebijakan. Strategi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan akan dijadikan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di perangkat daerah. BPKAD dalam hal ini akan mendukung upaya

mencapai Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan strategi Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yaitu *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

Berikut strategi yang akan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 untuk memenuhi indikator kinerja dan sasaran strategisnya sebagaimana Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perumusan Strategi BPKAD Kabupaten Bogor

Visi	:	Kabupaten Bogor Ter maju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa		
Misi Ke-5	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1.1. Ketepatan Penetapan APBD	1.1.1.	Meningkatkan proses penyusunan APBD yang akuntabel, aspiratif, dan transparan yang berorientasi kepada anggaran kinerja
			1.1.2.	Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah
		1.2. Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	1.2.1.	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima
			1.2.2.	Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah/Biro, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
			1.2.3.	Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah
			1.2.4.	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif
1.2.5.	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD			
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	2.1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	2.1.1.	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima
			2.1.2.	Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset
			2.1.3.	Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel
			2.1.4.	Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif
			2.1.5.	Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah

Tabel 2.7

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

VISI : KABUPATEN BOGOR TERMAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA
MISI KE-5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1.1 Meningkatkan proses penyusunan APBD yang akuntabel, aspiratif, dan transparan yang berorientasi kepada anggaran kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 	
		1.2 Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah		
		1.3 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima		<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
		1.4 Meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi Perangkat Daerah/Biro, Kecamatan/Desa dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor		
		1.5 Meningkatkan pembinaan penatusahaan keuangan pemerintah daerah		
		1.6 Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif		
		1.7 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD		
	2.1 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik daerah Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor 		
	2.2 Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset			
	2.3 Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel			
	2.4 Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif			
	2.5 Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah			

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya yang ditandatangani oleh Bupati Bogor.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Aset Kabupaten Bogor Tahun 2024 disusun sesuai dengan DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 yang bertujuan untuk menyesuaikan target yang hendak dicapai pada tahun yang bersangkutan.

Perjanjian Kinerja memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan Program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator sasaran berikut target kinerjanya, serta anggaran kegiatan yang tersedia sesuai dengan DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

Adapun Sasaran, Indikator, dan Target BPKAD pada Perjanjian Kinerja dapat disampaikan melalui Tabel berikut :

Tabel 2.8 Sasaran, Indikator, dan Target BPKAD pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target
		2024
3. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas di Perangkat Daerah	- Ketepatan Penetapan APBD	100% Tepat Waktu
	- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	90.28%
4. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	90.28%

Sesuai dengan DPPA BPKAD Tahun 2024, anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran

strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebesar Rp1.761.341.431.276

Sasaran Strategi BPKAD yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM UTAMA :

- **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas**
- **Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib**

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- Ketepatan Penetapan APBD
- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Sasaran ini dicapai melalui 2 Program :

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 5 kegiatan dan 32 Sub-Kegiatan, sebagai berikut :

1. **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;**

- Terdiri dari Sub-Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 7. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 9. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2. **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;**

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 5. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 6. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
 7. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 8. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;**
- Terdiri dari sub-sub kegiatan :
 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
4. **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;**
- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

5. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 7. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 8. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5. **Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah;**
- Terdiri dari sub-sub kegiatan :
 1. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
 2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
 3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 Sub-Kegiatan. sebagai berikut :
1. **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik daerah;**
 - Adapun 13 Sub-kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Buku Standar Harga;
 2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 3. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 4. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 5. Kegiatan Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bogor;
 6. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 8. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Penilaian Barang Milik Daerah;
 10. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
12. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
13. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

2. PROGRAM PENUNJANG :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah BPKAD, pelaksanaan program penunjang ini dicapai melalui 1 Program dan 7 Kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Terdiri dari sub-sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Mebel

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu visi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”**.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD atau indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Penetapan APBD,
2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi
3. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Tabel 2.9 Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	Prosentase
1	2	3
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI	54.301.522.417,00	3,08 %
BELANJA MODAL	9.654.502.689,00	0,55 %
BELANJA TIDAK TERDUGA	34.889.316.695,00	1,98 %
BELANJA TRANSFER	1.662.136.089.475,00	94,39 %
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.760.981.431.276,00	100,00 %

Anggaran perubahan sebesar **1.760.981.431.276,00** untuk mendanai 3 Program, 14 Kegiatan, 84 Sub Kegiatan. Berikut ini Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.10 Anggaran Perubahan Tahun 2024
Per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.708.954.194.861,00
5	02	02	2.01		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.476.051.521,00
5	02	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	526.949.507,00
5	02	02	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	525.392.176,00
5	02	02	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	261.678.854,00
5	02	02	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	171.719.456,00
5	02	02	2.01	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.889.201.388,00
5	02	02	2.01	08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.153.199.392,00
5	02	02	2.01	09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.027.767.922,00
5	02	02	2.01	10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	92.505.767,00
5	02	02	2.01	11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	252.131.036,00
5	02	02	2.01	12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	575.506.023,00
5	02	02	2.02		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.979.607.056,00
5	02	02	2.02	01	Sub Kegiatan Kooordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	490.337.054,00
5	02	02	2.02	03	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	281.061.649,00
5	02	02	2.02	04	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	268.702.476,00
5	02	02	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	290.430.778,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	02	2.02	06	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	233.475.582,00
5	02	02	2.02	09	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	206.793.652,00
5	02	02	2.02	10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	59.115.371,00
5	02	02	2.02	11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	149.690.494,00
5	02	02	2.03		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.293.400.864,00
5	02	02	2.03	01	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	212.539.270,00
5	02	02	2.03	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	325.245.197,00
5	02	02	2.03	04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	89.999.663,00
5	02	02	2.03	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	179.999.765,00
5	02	02	2.03	06	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	102.769.359,00
5	02	02	2.03	07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	90.380.567,00
5	02	02	2.03	09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	157.499.200,00
5	02	02	2.03	11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	134.967.843,00
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.697.025.406.170,00
5	02	02	2.04	08	Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.412.170.273.110,00
5	02	02	2.04	09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Menedesak	34.889.316.695,00
5	02	02	2.04	10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	249.965.816.365,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	02	2.05		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.179.729.250,00
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	83.148.466,00
5	02	02	2.05	02	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	516.451.603,00
5	02	02	2.05	03	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	580.129.181,00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.534.734.785,00
5	02	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.534.734.785,00
5	02	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	221.253.096,00
5	02	03	2.01	02	Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	92.617.359,00
5	02	03	2.01	03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	202.944.887,00
5	02	03	2.01	05	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	238.657.481,00
5	02	03	2.01	06	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	104.959.301,00
5	02	03	2.01	07	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	498.731.642,00
5	02	03	2.01	08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	280.936.089,00
5	02	03	2.01	09	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	301.575.408,00
5	02	03	2.01	10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	326.427.750,00
5	02	03	2.01	11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	157.219.397,00
5	02	03	2.01	12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	298.367.945,00
5	02	03	2.01	13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	811.044.430,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48.492.501.630,00
5	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	814.938.716,00
5	02	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.681.571,00
5	02	03	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40.352.865,00
5	02	03	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.951.411,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	03	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	51.716.795,00
5	02	03	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	53.093.723,00
5	02	03	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	140.963.253,00
5	02	03	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	362.179.098,00
5	02	03	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan	28.211.311.803,00
5	02	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.742.272.580
5	02	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.336.666
5	02	03	2.02	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.006.539
5	02	03	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.433.158
5	02	03	2.02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	156.234.642
5	02	03	2.02	08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	32.028.218
5	02	03	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	137.177.749,00
5	02	03	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.982.474
5	02	03	2.03	02	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	107.968.677
	02	03	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.226.598
5	02	03	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	625.068.692,00
5	02	03	2.05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.973.791
5	02	03	2.05	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.954.688
5	02	03	2.05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27.140.213,00
5	02	03	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00
5	02	03	2.05	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00
5	02	03	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.835.092.542,00

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
5	02	03	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	186.218.262,00
5	02	03	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.011.731.435,00
5	02	03	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.359.995,00
5	02	03	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	302.735.850,00
5	02	03	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	138.960.000,00
5	02	03	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	122.500.000,00
5	02	03	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.863.587.000,00
5	02	03	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.248.290.093,00
5	02	03	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.104.980.000,00
5	02	03	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.044.060,00
5	02	03	2.07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.266.033,00
5	02	03	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.577.406.769,00
5	02	03	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	239.224.864,00
5	02	03	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.152.093.596,00
5	02	03	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.186.088.309,00
5	02	03	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.043.215.266,00
5	02	03	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.000.000,00
5	02	03	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	520.750.000,00
5	02	03	2.09	08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	140.000.000,00
5	02	03	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	507.421.880,00
5	02	03	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	476.393.386,00
5	02	03	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	231.650.000,00
Jumlah :						1.760.981.431.276,00

2.3.2 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun Anggaran Perubahan 2024 dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.11 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas	1.708.954.194.861,00	99,79 %	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja dikurangi program penunjang sebesar Rp 48.492.501.630,00
2	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib	3.534.734.785,00	0,21 %	

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor mengampu 3 (tiga) program terdiri dari 1 (satu) program penunjang dengan 8 (delapan) kegiatan dan 40 sub kegiatan serta 2 (dua) program utama dengan 6 (Enam kegiatan) dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan, dengan anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2.12 Anggaran Belanja per Program Utama

No	Program	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.708.954.194.861,00	99,79 %	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja dikurangi program penunjang sebesar Rp 48.492.501.630,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.534.734.785,00	0,21 %	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III BERISI :

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 3.1.1 Sasaran Strategis 1
 - 3.1.1.1. Ketepatan Penetapan APBD
 - 3.1.1.2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi
 - 3.1.2 Sasaran Strategis 2
 - 3.1.2.1. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi
- 3.2 Capaian Kinerja dan Keuangan
- 3.3 Realisasi Anggaran
 - 3.4.3. Analisis Efisiensi

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2024 dilakukan dengan cara mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, serta pemenuhan kesesuaian standar akuntabilitas pengelolaan keuangan BPKAD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian indikator kinerja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024, didasarkan pada ketentuan:

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024 ditetapkan sebesar 100 %.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase (%) capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Sumber: Diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

Tabel 3.2 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d <70	Baik Sekali
5	< 55	Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

Berdasarkan Renstra BPKAD Tahun 2024-2026, pada Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Bogor menetapkan tujuan yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel di Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis BPKAD yaitu : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, dan Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan indikator sebagai berikut:

- Ketepatan Penetapan APBD dengan target kinerja "100 % (Tepat Waktu)";
- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi
- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

3.1.1 Sasaran Strategis 1



Gambar 3.1 Capaian dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas memiliki 2 capaian sesuai indikator sasaran strategis yaitu Ketepatan Penetapan APBD dengan capaian 100% dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi dengan capaian 103,08%.

3.1.1.1 Ketepatan Penetapan APBD

SASARAN : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas

Indikator : Ketepatan Penetapan APBD

Ketepatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek krusial dalam tata kelola keuangan daerah yang harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Berikut adalah beberapa aspek yang menentukan ketepatan penetapan APBD:

a) Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

APBD harus disusun dan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

b) Ketepatan Waktu dalam Penyusunan dan Penetapan

APBD harus ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan siklus perencanaan keuangan daerah. Keterlambatan dalam penetapan dapat berdampak pada terhambatnya program pembangunan dan pelayanan publik.

c) Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah

APBD harus disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah, seperti:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Ketepatan ini memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

d) Prinsip Transparansi dan Partisipasi Publik

Ketepatan penetapan APBD juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

- Forum konsultasi publik
- Penyampaian rancangan APBD secara terbuka

e) Efisiensi dan Efektivitas Penganggaran

APBD harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta memastikan bahwa belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f) Pengawasan dan Evaluasi

Proses pengawasan oleh DPRD, BPK, dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memastikan ketepatan penetapan APBD. Evaluasi terhadap realisasi APBD perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pencapaian target yang telah direncanakan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, penetapan APBD dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan capaian **Ketepatan Penetapan APBD** Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target Tepat Waktu dan terealisasi sebesar Tepat Waktu.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

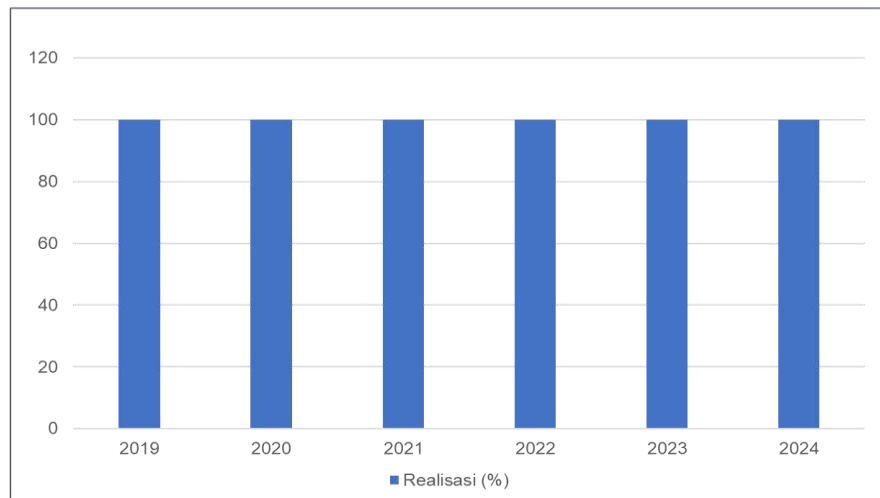


Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Dari segi realisasi, Ketepatan Penetapan APBD sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 100%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Ketepatan Penetapan APBD sama dengan tahun

sebelumnya, capaian kinerja tahun 2023 adalah Tepat Waktu dan pada tahun 2024 adalah Tepat Waktu.

TREN PERKEMBANGAN KETEPATAN PENETAPAN APBD



Sumber: Renstra Perubahan Tahun 2018-2023; Renstra Tahun 2024-2026

Gambar 3.3 Perkembangan Ketepatan Penetapan APBD Tahun 2019-2024

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dampak terlihat konsisten di angka 100% selama beberapa tahun berturut-turut (2019-2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai sepenuhnya setiap tahunnya tanpa adanya perubahan signifikan. Menunjukkan kinerja yang konsisten dengan target yang stabil dan realistis.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra



Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Gambar tersebut menampilkan pencapaian kinerja tahun 2024 terkait ketepatan penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berikut penjelasannya:

1. Capaian 2024 - Ketepatan Penetapan APBD

- Target yang ditetapkan adalah **tepat waktu**.
- Realisasi yang dicapai juga **tepat waktu**, sesuai target.
- Tingkat pencapaian adalah **100%**, artinya target berhasil dicapai sepenuhnya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

- Target tahun 2024 adalah **tepat waktu** dalam penetapan APBD.
- Capaian terhadap target Rencana Strategis (Renstra) juga **100%**, artinya seluruh target yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra berhasil dipenuhi.

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Ketepatan Penetapan APBD Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 100% dari target akhir RENSTRA Tepat Waktu dan terealisasi Tepat Waktu pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam penetapan APBD tahun 2024 berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi



Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi

Ketepatan **penetapan** APBD Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi karena beberapa alasan berikut:

1. Perbedaan Kondisi dan Karakteristik Daerah

Setiap daerah memiliki kondisi fiskal, dinamika politik, serta kapasitas administrasi yang berbeda dalam menetapkan APBD. Hal ini membuat perbandingan dengan rata-rata nasional/provinsi menjadi kurang relevan.

2. Regulasi dan Kebijakan yang Berbeda

Terkadang, ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat atau regulasi baru yang memengaruhi proses penetapan APBD di suatu daerah, sementara daerah lain mungkin tidak terdampak.

3. Variasi Proses dan Waktu Pembahasan

Setiap daerah memiliki dinamika dalam pembahasan APBD, termasuk perbedaan dalam kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

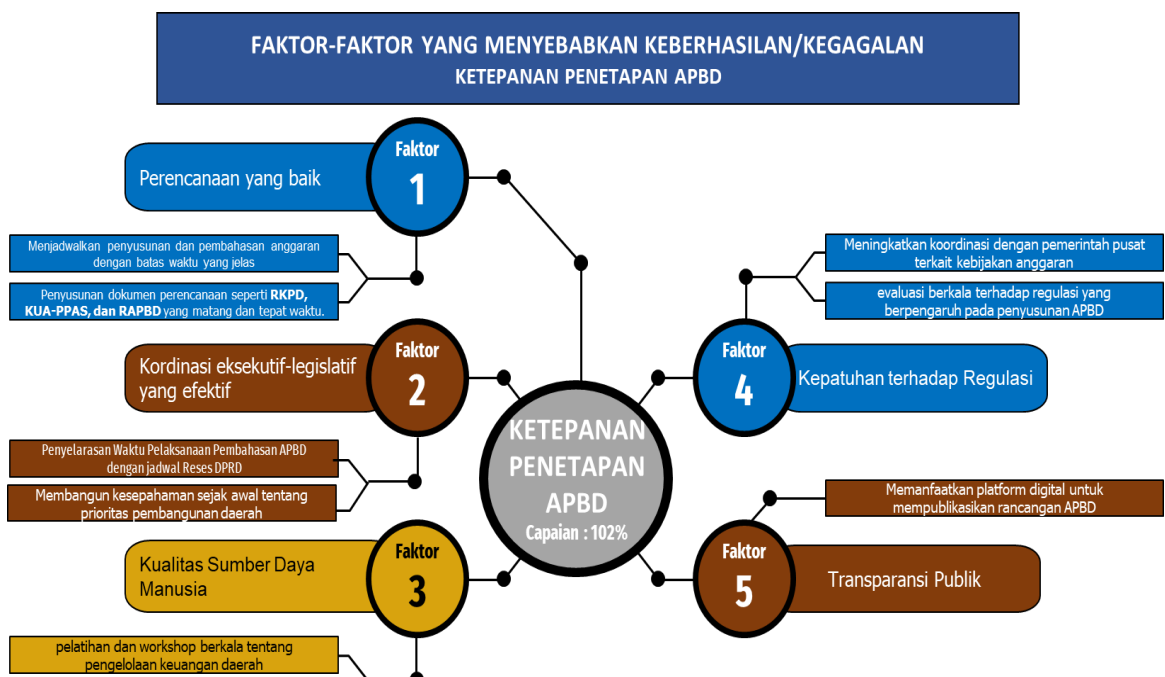
Faktor keterlambatan seperti pembahasan yang alot, revisi berkali-kali, atau perubahan asumsi makro ekonomi bisa berbeda di tiap daerah.

4. Tidak Ada Standar Seragam dalam Pengukuran Ketepatan

Ketepatan waktu penetapan APBD bisa dihitung berdasarkan tanggal tertentu, tetapi dalam praktiknya, daerah mungkin memiliki perbedaan prosedural atau penyesuaian yang membuat perbandingan dengan rata-rata nasional/provinsi tidak sepenuhnya valid.

Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional/provinsi karena berbagai faktor, capaian 100% dalam ketepatan penetapan APBD tetap menjadi indikator keberhasilan daerah dalam perencanaan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan dalam menjalankan program pembangunan.

d. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD



Gambar 3.6 Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Ketepatan Penetapan APBD

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian Ketepatan Penetapan APBD meliputi:

1. Perencanaan Anggaran yang Baik

Upaya yang dilakukan:

- Menjadwalkan penyusunan dan pembahasan anggaran dengan batas waktu yang jelas.
- Penyusunan dokumen perencanaan seperti **RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD** yang matang dan tepat waktu.

2. Kordinasi eksekutif-legislatif yang efektif

Upaya yang dilakukan:

- Penyelarasan Waktu Pelaksanaan Pembahasan APBD dengan jadwal Reses DPRD
- Membangun kesepahaman sejak awal tentang prioritas pembangunan daerah

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan:

- Pelatihan dan workshop berkala tentang pengelolaan keuangan daerah

4. Kepatuhan terhadap Regulasi

Upaya yang dilakukan:

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan anggaran
- Evaluasi berkala terhadap regulasi yang berpengaruh pada penyusunan APBD

5. Transparansi Publik

Upaya yang dilakukan:

- Memanfaatkan platform digital untuk mempublikasikan rancangan APBD

Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Ketepatan Penetapan APBD terkait sosialisasi kebijakan, terlampir.

e. Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025

Berdasarkan hasil rekomendasi Bapedalitbang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) **Ketepatan Penetapan APBD** tidak berlaku lagi karena dari hasil rekomendasi, Ketepatan Penetapan APBD udah termasuk ke dalam IKU **"Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi"**

3.1.1.2 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

SASARAN : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
Indikator : Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan



Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah merujuk pada sejauh mana pemerintah daerah mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengelola anggaran dan sumber daya keuangan.

Kepatuhan ini dapat diukur melalui beberapa aspek berikut:

a) Kepatuhan terhadap Regulasi

- Mengacu pada kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memastikan bahwa kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

b) Proses Penganggaran dan Perencanaan

- Penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi.
- Adanya keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran melalui Musrenbang.

c) Pelaksanaan Anggaran

- Penggunaan anggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

d) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

- Adanya mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah untuk memastikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan lainnya.

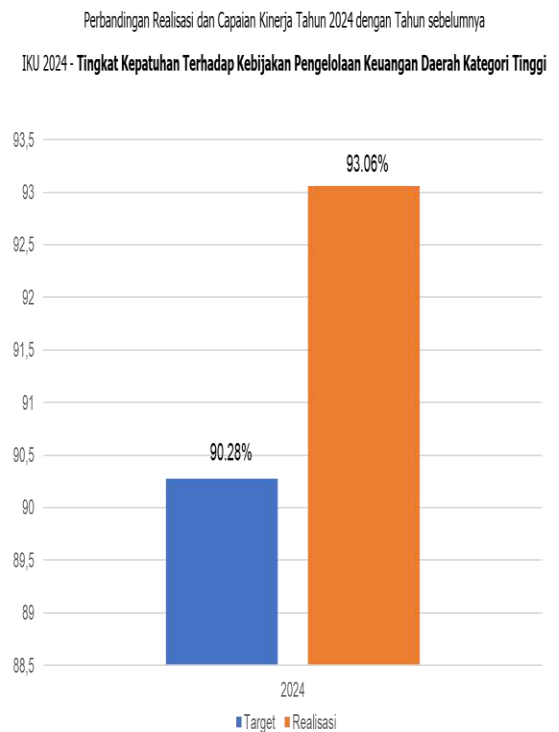
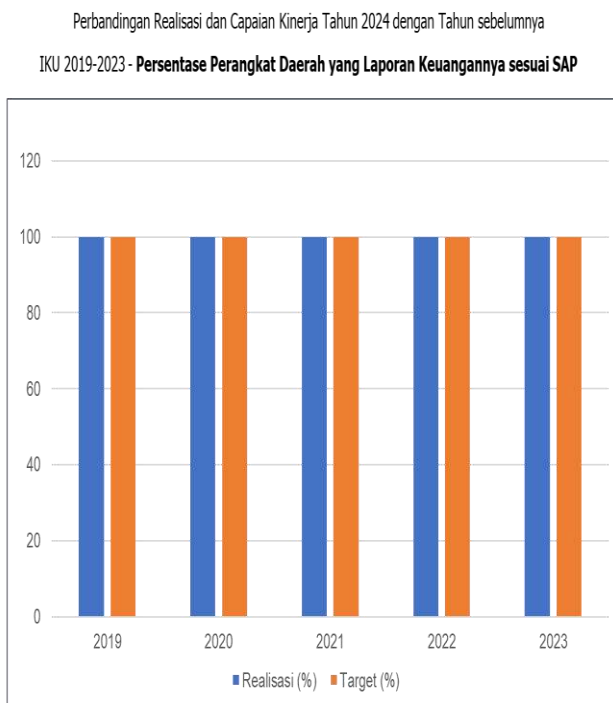
e) Evaluasi dan Pengawasan

- Pemeriksaan berkala oleh BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Penggunaan indikator kinerja untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Sebaliknya, ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi administratif, penurunan opini BPK, atau bahkan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran yang signifikan.

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan capaian **Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi** Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sangat baik dengan capaian kinerja 103.08% dari target 90.28% dan terealisasi sebesar 93.06%.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya



Sumber: Renstra Tahun 2024-2026



Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki perbedaan Indikator, pada tahun sebelumnya memiliki indikator "**Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP**", sedangkan mulai tahun 2024 indikator tersebut diganti dengan "**Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi**". Perbedaan tersebut dapat terlihat dari:

1. Perbedaan Definisi dan Fokus Indikator

Indikator yang digunakan pada tahun sebelumnya, yaitu "Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya Sesuai SAP," lebih mengarah pada aspek kepatuhan administratif dan kesesuaian prosedural dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Artinya, indikator ini mengukur sejauh mana perangkat daerah mampu memenuhi standar akuntansi yang berlaku (SAP).

Sementara itu, indikator yang digunakan mulai tahun 2024, yaitu "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi," mengukur kepatuhan terhadap kebijakan yang lebih luas terkait pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, yang melibatkan bukan hanya laporan keuangan tetapi juga implementasi kebijakan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Meskipun keduanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, keduanya memiliki aspek yang berbeda dalam pengukuran dan cakupan yang dinilai, yang mengarah pada pengukuran yang berbeda pula. Oleh karena itu, meskipun keduanya tercapai lebih melebihi target yang ditentukan, perbedaan fokus dan definisi indikator ini membuat hasilnya sulit untuk dibandingkan secara langsung.

2. Tujuan dan Sasaran yang Berbeda

Meskipun keduanya menilai kinerja di bidang pengelolaan keuangan, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai juga dapat berbeda. Indikator pertama fokus pada pencapaian standar akuntansi, sedangkan indikator kedua berfokus pada kepatuhan terhadap kebijakan yang lebih luas, yang bisa mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, meskipun hasil capaian di atas 100% menunjukkan keberhasilan, perbandingan langsung antara kedua indikator tersebut tidak dapat menggambarkan kesetaraan hasil secara objektif

Dari segi realisasi, Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi mencapai 93,06% dari target 90,28%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki indikator yang berbaeda.

Meskipun indikator yang digunakan pada berbeda, pencapaian sudah mencapai target yang ditentukan, keduanya menandakan keberhasilan dalam mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga memberikan gambaran positif terhadap kinerja yang dicapai.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra



Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 9,15% dari target akhir RENSTRA sebesar 92,00% dan terealisasi 93,06% pada tahun 2024.

Pencapaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 yang melebihi target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap berbagai aspek, antara lain:

1. Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah:

Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi:

Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan akuntabilitas ini berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan di Kabupaten Bogor.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD. Peningkatan efisiensi ini termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah.

4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan:

Kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan baik dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten



Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja Utama **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi”** Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi karena beberapa alasan berikut:

1. Perbedaan Karakteristik dan Kapasitas Fiskal Daerah

Setiap daerah memiliki struktur keuangan yang berbeda, termasuk sumber pendapatan, tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat, dan kapasitas dalam mengelola anggaran. Hal ini membuat standar kepatuhan terhadap kebijakan keuangan daerah tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung.

2. Variasi Implementasi Kebijakan di Setiap Daerah

Meskipun regulasi pengelolaan keuangan daerah bersifat nasional, penerapan di masing-masing daerah dapat berbeda tergantung pada kualitas tata kelola, kesiapan sistem, serta sumber daya manusia yang tersedia.

3. Perbedaan Mekanisme Evaluasi dan Pengukuran

- Beberapa daerah mungkin memiliki sistem audit dan pengawasan internal yang lebih ketat dibandingkan daerah lain.

- Standar dan metode yang digunakan dalam mengukur kepatuhan bisa saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga hasilnya tidak selalu sebanding.

Walaupun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi, capaian **100% dengan realisasi 93,06% dari target 90,28%** tetap menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan **kepatuhan yang tinggi, transparansi, serta efektivitas tata kelola keuangan yang optimal**.

d. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi



Gambar 3.10 Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

1. Kepatuhan terhadap regulasi

Faktor pertama mencakup pentingnya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Solusi yang diberikan adalah sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan berkala untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terkait aturan yang berlaku.

2. **Pemahaman Koresi Indikator Anggaran dan Rincian Anggaran**

Faktor kedua menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai indikator dan rincian anggaran. Untuk mencapainya, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD serta kinerja yang jelas terkait anggaran.

3. **Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Faktor ketiga berfokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, khususnya di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan rutin dan penguatan kapasitas menjadi upaya utama yang disarankan.

4. **Sistem Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel**

Faktor keempat menekankan pentingnya sistem pengelolaan keuangan yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini disarankan untuk melakukan optimalisasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. **Pengawasan dan Penegakan Aturan**

Faktor kelima berhubungan dengan penguatan mekanisme pengawasan dan audit. Diperlukan audit yang berkala dengan adanya mekanisme reward dan punishment untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi" terkait evaluasi Kinerja, Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan terlampir.

e. **Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025**



Gambar 3.11 Penyesuaian Target Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi

Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi meliputi :

1. Meningkatkan Standar Kinerja

- Dengan menaikkan target, pemerintah daerah lebih terdorong untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan keuangan daerah.

2. Konsistensi dengan Tren Peningkatan

- Tren capaian menunjukkan perbaikan, sehingga target yang lebih tinggi lebih realistis dibanding mempertahankan angka di bawah realisasi sebelumnya.

3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

- Target yang lebih tinggi akan memotivasi peningkatan pengawasan, pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

4. Optimalisasi Sistem dan Teknologi Informasi

3.1.2 Sasaran Strategis 2

3.1.2.1 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

SASARAN	: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas
Indikator	: Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi



Gambar 3.12 Capaian 2024 Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori tinggi mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mematuhi

regulasi yang berlaku dalam pengelolaan aset daerah. Kepatuhan ini mencakup aspek perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, serta penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati Bogor No. 48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Bogor No. 12 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Prinsip utama dalam pengelolaan BMD mencakup *kepatuhan terhadap prosedur perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.*

- **Tingkat Kepatuhan dalam Pengelolaan BMD**

Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD dapat diukur berdasarkan aspek berikut :

- ✚ **Perencanaan dan Pengadaan**

- Kesesuaian pengadaan BMD dengan kebutuhan dan prioritas daerah
- Kepatuhan terhadap proses perencanaan anggaran
- Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan regulasi yang berlaku

- ✚ **Pencatatan dan Inventarisasi**

- Ketaatan dalam mencatat dan melaporkan aset daerah
- Kelengkapan dokumen administrasi barang milik daerah
- Penggunaan sistem informasi manajemen aset daerah

- ✚ **Pemanfaatan dan Pemeliharaan**

- Kepatuhan terhadap prosedur pemanfaatan barang milik daerah
- Kepatuhan terhadap pemeliharaan aset agar tetap dalam kondisi baik
- Efektivitas dalam penggunaan aset untuk kepentingan pelayanan publik

- ✚ **Pemindahtanganan dan Penghapusan**

- Prosedur pemindahtanganan aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Ketepatan dalam proses penghapusan aset yang sudah tidak digunakan
- Kepatuhan terhadap mekanisme lelang atau hibah barang milik daerah

Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tinggi untuk tahun **2024**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Kepatuhan: 95,38%

- Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD sudah mencapai 95,38% dari target yang ditetapkan.
 - Angka ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dalam penerapan kebijakan terkait aset daerah.

2. Target: 90,28

- Target awal yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 90,28.
- Artinya, pemerintah daerah berharap tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD minimal berada pada angka tersebut.

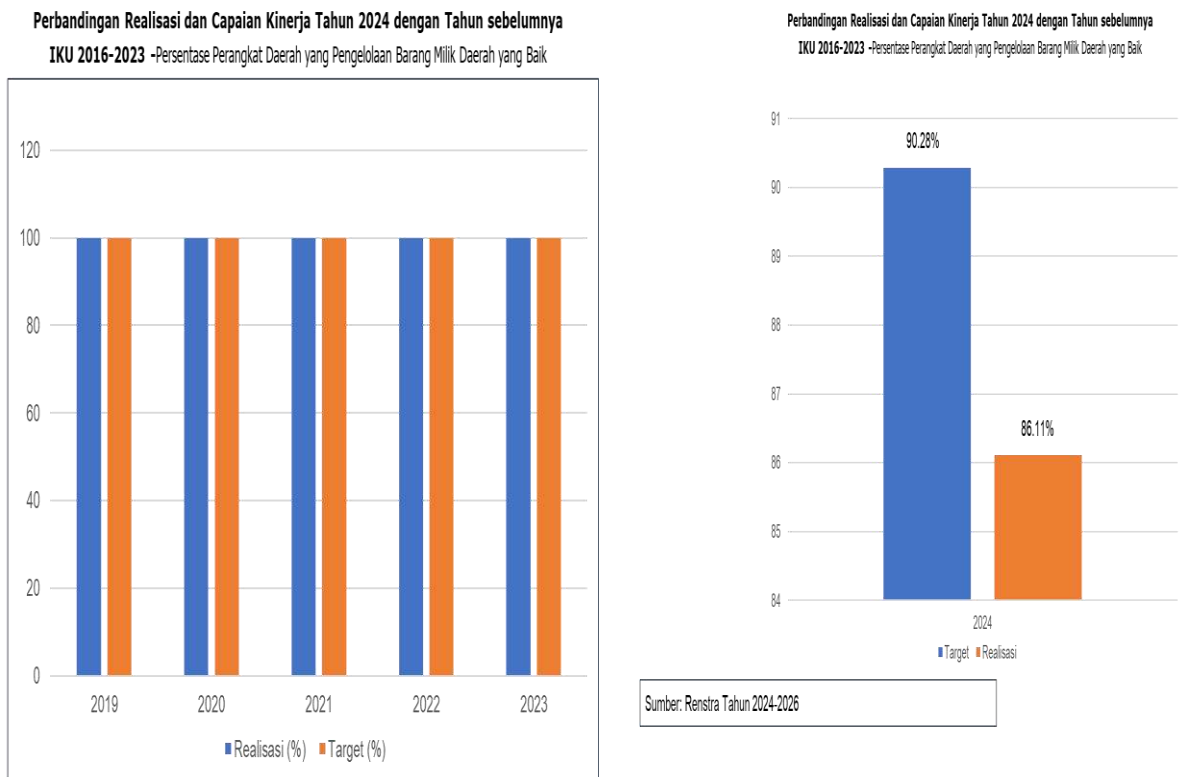
3. Realisasi: 86,11

- Realisasi aktual dari kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD adalah 86,11.
- Meskipun sudah cukup tinggi, realisasi ini masih berada di bawah target yang telah ditentukan.

Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dalam **efektivitas pengelolaan APBD, kepatuhan regulasi, transparansi, serta optimalisasi aset daerah**. Kondisi ini mencerminkan bahwa tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dan mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya





Gambar 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Dari segi realisasi, Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi mencapai 86.11% dari target 90,28%. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan memiliki perbedaan Indikator, pada tahun sebelumnya

- ✦ Indikator lama ("Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD yang Baik") lebih berorientasi pada jumlah OPD yang mampu mengelola BMD dengan baik, tetapi tidak mengukur kepatuhan terhadap regulasi secara menyeluruh.
- ✦ Indikator baru ("Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan BMD Kategori Tinggi") lebih fokus pada kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan dan aturan yang berlaku, mencerminkan sejauh mana regulasi ditaati.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya tidak dapat dilakukan perbandingan secara langsung karena terdapat perbedaan indikator kinerja yang digunakan pada masing-masing tahun.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra



Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Dilihat dari perspektif perencanaan Jangka menengah, capaian “Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi” Kabupaten Bogor tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 1.78% dari target akhir RENSTRA sebesar 93.60% dan terealisasi 86.11% pada tahun 2024.

Capaian ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Bogor. Terdapat peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan pengelolaan BMD, yang menunjukkan efektivitas kebijakan dan pengawasan yang dilakukan selama periode perencanaan. Secara agregat, target RENSTRA telah terlampaui, meskipun pada tahun 2024 sendiri, target tahunan belum sepenuhnya tercapai. Realisasi 2024 kurang dari target, maka akan diadakan evaluasi dan perbaikan di aspek regulasi, sistem, SDM, dan koordinasi antar OPD. Penguatan pengawasan, digitalisasi, dan pelatihan SDM juga akan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan BMD, serta penggunaan sistem informasi pengelolaan aset daerah akan lebih dimaksimalkan, sehingga pencatatan dan pelaporan aset daerah dapat dilakukan secara lebih sistematis dan real-time. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan dapat meningkat dan target yang ditetapkan di tahun berikutnya dapat tercapai.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten



Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional/Provinsi/Kabupaten

Indikator Kinerja Utama **“Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi”** Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi dikarenakan memiliki karena beberapa alasan berikut:

1. **Perbedaan Indikator dan Kriteria:** Setiap daerah mungkin menggunakan indikator atau kriteria yang berbeda dalam mengukur tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
2. **Regulasi dan Kebijakan yang Berbeda:** Setiap daerah memiliki kebijakan dan regulasi pengelolaan barang milik daerah yang bisa bervariasi, tergantung pada peraturan daerah masing-masing.
3. **Metodologi Pengukuran yang Berbeda:** Daerah dapat menggunakan metode yang berbeda dalam mengukur dan melaporkan tingkat kepatuhan, sehingga data yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan secara langsung.
4. **Faktor Sumber Daya dan Infrastruktur:** Sumber daya dan kapasitas daerah dalam menerapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat mempengaruhi hasil pengukuran kepatuhan yang berbeda antara daerah satu dengan lainnya.
5. **Tahapan Implementasi yang Berbeda:** Beberapa daerah mungkin masih dalam tahap awal penerapan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, sementara daerah lain sudah lebih maju dalam implementasinya.

Walaupun tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional atau provinsi, capaian **95,38% dengan realisasi 86,11% dari target 90,28%** tetap menjadi indikator keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan **kepatuhan yang**

tinggi, transparansi, serta efektivitas tata kelola Barang Milik Daerah yang optimal.

d. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi



Gambar 3.16 Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan/Kegagalan Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi

Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

1. Kepatuhan terhadap Regulasi

Faktor pertama menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk mencapainya, diperlukan:

- Koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pengelolaan BMD.
- Komitmen pimpinan dalam menjalankan dan menerapkan regulasi dengan baik.

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Efisien

Agar aset daerah dapat dikelola secara optimal, dibutuhkan:

- Rekonsiliasi jadwal pemeliharaan, pencatatan, dan pelaporan BMD secara rutin dan tepat waktu.

- Ketepatan penyampaian laporan BMD oleh perangkat daerah untuk meningkatkan akuntabilitas.

3. Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan:

- Pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam pelayanan OPD dan pengelolaan keuangan daerah.
- Komitmen pengguna dan pengurus barang dalam merencanakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sesuai ketentuan.

4. Sistem Pengelolaan Aset yang Terintegrasi

Pengelolaan aset yang efektif membutuhkan sistem yang baik, yaitu melalui:

- Pembinaan sistem pengelolaan BMD agar lebih terstruktur dan efisien.
- Optimalisasi sistem manajemen aset berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.

5. Pengawasan dan Penegakan Aturan

Agar kebijakan pengelolaan aset daerah berjalan dengan baik, perlu dilakukan:

- Ketepatan penyampaian laporan BMD oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pengawasan.
- Penguatan audit berkala dengan menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk meningkatkan kepatuhan.

Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuanganyang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi" terkait Pelaksanaan Sosialisasi, Rekonsiliasi BMD dan Upaya pencapaian melalui reward and punishment terlampir.

e. Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tahun 2025



Gambar 3.16 Rekomendasi Penyesuaian Target IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi meliputi :

1. Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi

- Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan Barang Milik Daerah.
- Meningkatkan sosialisasi regulasi kepada seluruh perangkat daerah.

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Lebih Efektif

- Menyusun jadwal pemeliharaan yang lebih terstruktur dan memastikan pencatatan yang lebih akurat.
- Meningkatkan ketepatan penyampaian laporan BMD secara rutin dan tepat waktu.

3. Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM

- Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan aset daerah.
- Memperkuat komitmen pengguna dan pengelola barang dalam merencanakan kebutuhan aset sesuai regulasi.

4. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Aset Berbasis Teknologi

- Meningkatkan penggunaan sistem manajemen aset yang lebih modern dan berbasis digital.
- Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap implementasi sistem pengelolaan BMD yang sudah ada.

5. Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Ketat

- Melakukan audit berkala dengan mekanisme *reward and punishment* untuk meningkatkan kepatuhan.
- Mengoptimalkan peran pengawasan internal dalam memastikan pengelolaan BMD sesuai ketentuan.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga target yang direvisi untuk tahun 2025 dapat tercapai dengan lebih baik.

3.2 Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengukuran capaian kinerja dan Keuangan BPKAD Tahun 2024

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

Realisasi Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Realisasi Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024	
		K	S	Rp.	K	Rp
2	3	4			5	
URUSAN : PENUNJANG						
BIDANG URUSAN : KEUANGAN						
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda APBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor beserta Perbup Penjabarannya	100,00	Tepat /Tidak Tepat Waktu	1.708.954.194.861,00	100,00	1.697.745.912.722,54
	2. Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	99,00	%		99,00	
	3. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00	Tepat /Tidak Tepat Waktu		100,00	
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	100,00	%	7.476.051.521,00	97,54	7.113.892.872,34
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	Dokumen	526.949.507,00	1,00	509.616.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	Dokumen	525.392.176,00	1,00	515.571.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	261.678.854,00	72,00	260.659.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	171.719.456,00	72,00	169.528.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	1.889.201.388,00	2,00	1.798.030.480,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	2.153.199.392,00	2,00	2.026.879.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	50	Dokumen	1.027.767.922,00	45,00	936.441.232,00
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Dokumen	92.505.767,00	1,00	90.841.500,00
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Dokumen	252.131.036,00	1,00	241.641.388,00
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Dokumen	575.506.023,00	1,00	564.685.272,34
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	100,00	%	1.979.607.056,00	100,00	1.875.765.652,76
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	490.337.054,00	12,00	454.139.658,24
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	500	Dokumen	281.061.649,00	500,00	251.759.019,88
Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	268.702.476,00	1,00	259.880.186,16
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	290.430.778,00	12,00	275.309.010,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6	Dokumen	233.475.582,00	6,00	231.267.452,00
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	Dokumen	206.793.652,00	1,00	199.938.800,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024	
Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	59.115.371,00	1,00	58.231.526,48
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	149.690.494,00	72,00	145.240.000,00
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100,00	%	1.293.400.864,00	100,00	1.254.134.412,44
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1	Laporan	212.539.270,00	1,00	208.887.838,56
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	Laporan	325.245.197,00	19,00	311.488.121,00
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	Laporan	89.999.663,00	1,00	89.697.559,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	179.999.765,00	2,00	179.561.019,00
Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	102.769.359,00	1,00	101.686.340,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12	Dokumen	90.380.567,00	12,00	82.084.193,60

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024	
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	1	Dokumen	157.499.200,00	1,00	147.946.841,28
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	134.967.843,00	72,00	132.782.500,00
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	100,00	%	1.697.025.406.170,00	100,00	1.686.353.127.206,00
Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan	1.412.170.273.110,00	1,00	1.405.064.721.493,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	34.889.316.695,00	1,00	32.881.048.832,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	Laporan	249.965.816.365,00	1,00	248.407.356.881,00
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	100,00	%	1.179.729.250,00	100,00	1.148.992.579,00
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	83.148.466,00	1,00	82.388.486,00
Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	516.451.603,00	1,00	513.088.910,00
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	580.129.181,00	72,00	553.515.183,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	90,00	%	3.534.734.785,00	90,00	3.375.854.141,00
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahanya tepat waktu	90,00	%	3.534.734.785,00	90,00	3.375.854.141,00
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	Dokumen	221.253.096,00	2,00	211.522.768,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024	
Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	92.617.359,00	1,00	87.834.784,00
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	202.944.887,00	2,00	201.794.034,00
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	238.657.481,00	1,00	234.421.504,00
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	104.959.301,00	1,00	97.604.944,00
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	498.731.642,00	1,00	474.837.426,00
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	280.936.089,00	2,00	269.326.450,00
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	301.575.408,00	1,00	243.394.568,00
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	326.427.750,00	1,00	309.540.414,00
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	Laporan	157.219.397,00	2,00	156.938.309,00
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	298.367.945,00	2,00	295.077.655,00
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	811.044.430,00	72,00	793.561.285,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP BPKAD	BB	Kategori	48.492.501.630,00	0,00	45.670.718.589,46
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	100,00	%	814.938.716,00	100,00	794.627.014,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	134.681.571,00	9,00	128.028.730,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	40.352.865,00	1,00	39.340.500,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	31.951.411,00	1,00	31.207.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	51.716.795,00	1,00	50.502.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	53.093.723,00	1,00	52.357.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan	140.963.253,00	7,00	138.027.784,00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	17	Laporan	362.179.098,00	17,00	355.164.000,00
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100,00	%	28.211.311.803,00	100,00	27.193.762.481,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	Orang/ Bulan	27.742.272.580	97,00	26.763.630.859,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	194.336.666	1,00	192.413.132,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	38.006.539	1,00	36.978.296,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	48.433.158	2,00	47.716.720,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan	156.234.642	24,00	121.716.886,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	32.028.218	2,00	31.306.588,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	100,00	%	137.177.749,00	100,00	135.848.028,00
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	15.982.474	1,00	15.869.696,00
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	107.968.677	1,00	106.841.200,00
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	13.226.598	1,00	13.137.132,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100,00	%	625.068.692,00	99,26	563.938.444,00
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	17.973.791	1,00	15.135.944,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	29.954.688	1,00	27.657.500,00
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	97	Dokumen	27.140.213,00	97,00	25.170.000,00
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kerjasama dan disiplin pegawai	20	Orang	100.000.000,00	18,00	46.500.000,00
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	Orang	450.000.000,00	150,00	449.475.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya	100,00	%	7.835.092.542,00	100,00	7.032.516.090,00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	186.218.262,00	1,00	180.239.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	5.011.731.435,00	9,00	4.875.119.500,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	209.359.995,00	6,00	179.769.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	302.735.850,00	2,00	297.310.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen	138.960.000,00	1,00	137.695.000,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	122.500.000,00	12,00	107.068.000,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.863.587.000,00	12,00	1.255.315.590,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	100,00	%	6.248.290.093,00	97,14	5.901.883.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Roda 4 dan Roda 2)	28	Unit	6.104.980.000,00	27,00	5.768.750.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	26.044.060,00	1,00	24.540.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	117.266.033,00	6,00	108.593.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terlayani jasa penunjang	100,00	%	2.577.406.769,00	100,00	2.157.274.279,46
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	239.224.864,00	12,00	238.077.224,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.152.093.596,00	12,00	894.522.701,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.186.088.309,00	12,00	1.024.674.354,46
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	100,00	%	2.043.215.266,00	96,15	1.890.869.253,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kendaraan Roda 4)	15	Unit	167.000.000,00	14,00	120.597.866,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	133	Unit	520.750.000,00	128,00	436.057.100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	Unit	140.000.000,00	2,00	139.400.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	507.421.880,00	3,00	500.842.161,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	476.393.386,00	1,00	464.490.426,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	231.650.000,00	2,00	229.481.700,00
Jumlah :				1.760.981.431.276,00		1.746.792.485.453,00

3.2.2 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2018 – Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 REALISASI ANGGARAN BELANJA BPKAD TAHUN 2018-2024

Uraian	2018 Audited			2019 Audited			2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	45,62	42,35	92,84	43,06	41,24	95,76	49,28	44,21	89,71	39,25	37,75	96,17	47,37	42,71	90,15
Belanja Pegawai	28,78	27,84	96,73	28,05	27,54	98,19	29,63	27,39	92,46	22,26	22,03	99,00	28,04	25,47	90,84
Belanja Barang Dan Jasa	16,84	14,51	86,18	15,02	13,70	91,22	19,65	16,82	85,57	17,00	15,71	92,46	19,34	17,24	89,16
Belanja Modal	1.432	1.412	98,60	2.200	2.117	96,22	7.892	6.718	85,12	1.080	1.005	93,06	1.550	1.261	81,35
Belanja Peralatan Dan Mesin	1.432	1.412	98,60	2.005	1.926	96,06	7.510	6.350	84,55	846	773	91,37	1.007	900	89,37
Belanja Gedung Dan Bangunan	0	0	0,00	184	180	97,83	367	355	96,73	14,0	14,0	100,00	318	312	98,11
Belanja Jalan Irigasi Dan Jaringan	0	0	0,00	10,8	10,7	99,07	15	13	86,67	0	0	0,00	0	0	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	220	218	99,09	225	49	21,78
Belanja Aset Lainnya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Uraian	2018 Audited			2019 Audited			2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Terduga	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	90.785	75.948	83,66	59.532	30.229	50,78
Belanja Transfer	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1.417.714	1.409.487	99,42	1.532.325	1.523.675	99,44
Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Desa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	166.155	166.155	100	222.435	222.278	99,93
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1.251.559	1.243.332	99,34	1.309.890	1.301.397	99,35
Total Belanja Daerah	1.478	1.454	98,43	2.243	2.158	96,21	7.941	6.762	85,15	1.509.618	1.486.478	98,47	1.593.454	1.555.208	97,60

Uraian	2023 Audited			2024 An-Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	55.631	43.530	78,25	54.303,00	51.168,00	94,23
Belanja Pegawai	33.573	23.978	96,73	27.743,00	26.764,00	96,47
Belanja Barang Dan Jasa	22.058	19.552	86,18	26.560,00	24.404,00	91,88
Belanja Modal	4.159	4.022	96,71	9.655	9.307	96,40
Belanja Peralatan Dan Mesin	3.827	3.691	96,45	9.067,00	8.727,00	96,25
Belanja Gedung Dan Bangunan	221	220	0,00	302,00	294,00	97,35
Belanja Jalan Irigasi Dan Jaringan	-	-	0,00	-	-	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	111	111	0,00	0	0	0,00
Belanja Aset Lainnya	-	-	0,00	286,00	286,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	53.099	52.261	98,42	34.889,00	32.872,00	94,22
Belanja Tidak Terduga	53.099	52.261	0,00	34.889,00	32.872,00	0,00
Belanja Transfer	1.623.475	1.602.333	0,00	1.662.136,00	1.653.448,00	99,48
Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Desa	227.553	227.375	0,00	249.966,00	248.983,00	99,61
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	1.395.922	1.374.958	0,00	1.412.170,00	1.404.465,00	99,45
Total Belanja Daerah	1.736.364	1.702.146	98,03	1.760.983	1.746.795	99,19

Realisasi Anggaran dalam 000.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018-2024

Tabel 3.5 REALISASI PENDAPATAN BPKAD TAHUN 2018-2024

Uraian	2018 Audited			2019 Audited			2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah															
Pendapatan Asli Daerah	1,870	1,942	103.85	2,112	4,582	216.95	2,660	4,270	160.53	354,747	130,388	36.76	402,263	158,233	39.34
Hasil Retribusi Daerah	1,137	1,579	138.87	1,379	4,050	293.69	1,677	2,569	153.19	2,633	2,699	102.51	2,734	3,377	123.52
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	64,272	71,304	0,00	74,195	75,860	102.24
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	733	363	49.52	733	532	0,00	983	1701	0,00	287,842	56,385	0,00	325,334	78,996	24.28
Pendapatan Transfer	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4,813,212	4,729,476	98.26	5,430,955	5,282,559	97.27
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	3,083,609	3,065,553	99.41	3,745,851	3,601,509	96.15
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	598,660	598,314	99.94	568,915	568,003	99.84
Transfer Pemerintah Provinsi	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1,130,943	1,065,609	94.22	1,116,189	1,113,047	99.72
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	627,338	633,235	100.94	5,623	10,708	190.43

Uraian	2018 Audited			2019 Audited			2020 Audited			2021 Audited			2022 Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Hibah	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30,230	36,127	119.51	5,623	10,708	190.43
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	597,108	597,108	100.00	0	0	0,00
Total Pendapatan Daerah	1,870	1,942	103.85	2,112	4,582	216.95	2,660	4,270	160.53	5,795,297	5,493,099	94.79	5,838,841	5,451,500	93.37

Uraian	2023 Audited			2024 An-Audited		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah						
Pendapatan Asli Daerah	356,406	128,406	36.03	301,951	202,230	66,97
Hasil Retribusi Daerah	2,734	2,917	106.73	2,519	3,634	144,29
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	76,280	74,682	97.91	77,599	7,9015	101,83
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	277,392	50,807	18.32	221,833	119,581	53,91
Pendapatan Transfer	5,830,275	5,691,855	97.63	63,490,500	6,240,273	98,29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,581,602	4,501,826	98.26	5,108,721	5,046,513	98,78
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,248,673	1,190,029	95.30	1,240,329	1,193,759	96,25
Lain-lain Pendapatan yang Sah	12,950	13,988	108.02	0	9,737	0,00
Pendapatan Hibah	12,950	13,988	108.02	0	9,737	0,00
Total Pendapatan Daerah	6,199,632	5,834,382	94.11	6,651,001	6,452,240	97,01

Realisasi Anggaran dalam 000.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018-2024

3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah.

BPKAD Kabupaten Bogor melaksanakan tugasnya berdasarkan Rencana Strategis Hal ini dilakukan untuk kebutuhan data berupa angka. Berikut ini perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi Tahun 2024 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis.

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
1	2	3			4	
URUSAN : PENUNJANG						
BIDANG URUSAN : KEUANGAN						
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda APBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor beserta Perbup Penjabarannya	100,00	Tepat /Tidak Tepat Waktu	3.088.289.748.105,93	100,00	1.697.745.912.722,54
	2. Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	99,00	%		99,00	
	3. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00	Tepat /Tidak Tepat Waktu		100,00	
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	100,00	%	8.839.346.250,00	97,54	7.113.892.872,34
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	3,00	Dokumen	922.687.500,00	1,00	509.616.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	3,00	Dokumen	922.687.500,00	1,00	515.571.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	216,00	Dokumen	461.343.750,00	72,00	260.659.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	216,00	Dokumen	461.343.750,00	72,00	169.528.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	216,00	Dokumen	461.343.750,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	216,00	Dokumen	461.343.750,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6,00	Dokumen	1.537.812.500,00	2,00	1.798.030.480,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6,00	Dokumen	1.537.812.500,00	2,00	2.026.879.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150,00	Dokumen	615.125.000,00	45,00	936.441.232,00
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3,00	Dokumen	307.562.500,00	1,00	90.841.500,00
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3,00	Dokumen	307.562.500,00	1,00	241.641.388,00
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3,00	Dokumen	381.377.500,00	1,00	564.685.272,34
Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	216,00	Orang	461.343.750,00	0,00	0,00
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	100,00	%	5.689.906.250,00	100,00	1.875.765.652,76
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36,00	Dokumen	768.906.250,00	12,00	454.139.658,24

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1.500,00	Dokumen	615.125.000,00	500,00	251.759.019,88
Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3,00	Dokumen	615.125.000,00	1,00	259.880.186,16
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	36,00	Dokumen	461.343.750,00	12,00	275.309.010,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	21,00	Dokumen	615.125.000,00	6,00	231.267.452,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	6,00	Dokumen	615.125.000,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3,00	Dokumen	461.343.750,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	3,00	Dokumen	461.343.750,00	1,00	199.938.800,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3,00	Dokumen	615.125.000,00	1,00	58.231.526,48
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	216,00	Orang	461.343.750,00	72,00	145.240.000,00
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100,00	%	4.305.875.000,00	100,00	1.254.134.412,44
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	3,00	Laporan	615.125.000,00	1,00	208.887.838,56
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	57,00	Laporan	615.125.000,00	19,00	311.488.121,00
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3,00	Laporan	461.343.750,00	1,00	89.697.559,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6,00	Dokumen	768.906.250,00	2,00	179.561.019,00
Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3,00	Dokumen	615.125.000,00	1,00	101.686.340,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	36,00	Dokumen	307.562.500,00	12,00	82.084.193,60
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	3,00	Dokumen	461.343.750,00	1,00	147.946.841,28
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	216,00	Orang	461.343.750,00	72,00	132.782.500,00
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	100,00	%	3.068.070.589.355,93	100,00	1.686.353.127.206,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	3,00	Dokumen	461.343.750,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3,00	Laporan	307.562.500,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3,00	Laporan	3.066.994.120.605,93	1,00	1.405.064.721.493,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3,00	Laporan	307.562.500,00	1,00	32.881.048.832,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3,00	Laporan	461.343.750,00	1,00	248.407.356.881,00
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	100,00	%	1.384.031.250,00	100,00	1.148.992.579,00
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	3,00	Dokumen	307.562.500,00	1,00	82.388.486,00
Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3,00	Dokumen	615.125.000,00	1,00	513.088.910,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	216,00	Orang	461.343.750,00	72,00	553.515.183,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	92,00	%	3.877.660.486,17	90,00	3.375.854.141,00
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaannya tepat waktu	92,00	%	3.877.660.486,17	90,00	3.375.854.141,00
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6,00	Dokumen	230.671.875,00	2,00	211.522.768,00
Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	6,00	Dokumen	230.671.875,00	1,00	87.834.784,00
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6,00	Dokumen	230.671.875,00	2,00	201.794.034,00
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,00	Dokumen	307.562.500,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3,00	Laporan	230.671.875,00	1,00	234.421.504,00
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3,00	Laporan	307.562.500,00	1,00	97.604.944,00
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3,00	Laporan	307.562.500,00	1,00	474.837.426,00
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3,00	Laporan	307.562.500,00	2,00	269.326.450,00
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,00	Laporan	340.691.736,17	1,00	243.394.568,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3,00	Dokumen	384.453.125,00	1,00	309.540.414,00
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6,00	Laporan	307.562.500,00	2,00	156.938.309,00
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	6,00	Laporan	230.671.875,00	2,00	295.077.655,00
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	216,00	Orang	461.343.750,00	72,00	793.561.285,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP BPKAD	BB	Kategori	162.688.647.997,18	100,00	45.670.718.589,46
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	100,00	%	2.076.046.875,00	100,00	794.627.014,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,00	Dokumen	615.125.000,00	9,00	128.028.730,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,00	Dokumen	153.781.250,00	1,00	39.340.500,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,00	Dokumen	153.781.250,00	1,00	31.207.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3,00	Dokumen	92.268.750,00	1,00	50.502.000,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3,00	Dokumen	92.268.750,00	1,00	52.357.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,00	Laporan	430.587.500,00	7,00	138.027.784,00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	51,00	Laporan	538.234.375,00	17,00	355.164.000,00
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100,00	%	116.332.219.640,70	100,00	27.193.762.481,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	291,00	Orang/ Bulan	115.455.666.515,70	97,00	26.763.630.859,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,00	Dokumen	184.537.500,00	1,00	192.413.132,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,00	Dokumen	92.268.750,00	1,00	36.978.296,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,00	Laporan	92.268.750,00	2,00	47.716.720,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72,00	Laporan	461.343.750,00	24,00	121.716.886,00
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6,00	Dokumen	46.134.375,00	2,00	31.306.588,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	100,00	%	107.646.875,00	100,00	135.848.028,00
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3,00	Dokumen	46.134.375,00	1,00	15.869.696,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3,00	Dokumen	61.512.500,00	1,00	106.841.200,00
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,00	Laporan	46.134.375,00	1,00	13.137.132,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100,00	%	1.537.812.500,00	99,26	563.938.444,00
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7,00	Paket	461.343.750,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,00	Dokumen	76.890.625,00	1,00	15.135.944,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3,00	Dokumen	76.890.625,00	1,00	27.657.500,00
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	291,00	Dokumen	76.890.625,00	97,00	25.170.000,00
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kerjasama dan disiplin pegawai	340,00	Orang	768.906.250,00	18,00	46.500.000,00
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300,00	Orang	76.890.625,00	150,00	449.475.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya	100,00	%	3.167.838.388,75	100,00	7.032.516.090,00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,00	Paket	76.890.625,00	1,00	180.239.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15,00	Paket	615.125.000,00	9,00	4.875.119.500,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18,00	Paket	307.507.138,75	6,00	179.769.000,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6,00	Paket	384.453.125,00	2,00	297.310.000,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,00	Dokumen	307.562.500,00	1,00	137.695.000,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36,00	Laporan	246.050.000,00	12,00	107.068.000,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,00	Laporan	1.230.250.000,00	12,00	1.255.315.590,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	100,00	%	28.786.516.250,00	97,14	5.901.883.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Roda 4 dan Roda 2)	27,00	Unit	2.325.172.500,00	27,00	5.768.750.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	Unit	26.000.000.000,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15,00	Unit	230.671.875,00	1,00	24.540.000,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15,00	Unit	230.671.875,00	6,00	108.593.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terlayani jasa penunjang	100,00	%	6.930.765.467,73	100,00	2.157.274.279,46
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,00	Laporan	1.085.671.459,81	12,00	238.077.224,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36,00	Laporan	2.832.650.625,00	12,00	894.522.701,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36,00	Laporan	3.012.443.382,92	12,00	1.024.674.354,46
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	100,00	%	3.749.802.000,00	96,15	1.890.869.253,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)	
		K	S	Rp.	K	Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kendaraan Roda 4)	27,00	Unit	461.343.750,00	14,00	120.597.866,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	204,00	Unit	1.443.083.250,00	128,00	436.057.100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara	6,00	Unit	153.781.250,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6,00	Unit	307.562.500,00	2,00	139.400.000,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9,00	Unit	461.343.750,00	3,00	500.842.161,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6,00	Unit	461.343.750,00	1,00	464.490.426,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6,00	Unit	461.343.750,00	2,00	229.481.700,00
Jumlah :				3.254.856.056.589,27		1.746.792.485.453,00

3.2.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian kinerja BPKAD tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau capaian kinerja pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota lain secara keseluruhan karena berbeda dalam menentukan indikator dan formula indikatornya, sehingga yang dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya terkait dengan capaian pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, dan kontribusi PAD terhadap pendapatan.

Pendapatan Asli daerah

Perbandingan capaian pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 dan 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 31 DESEMBER 2023	%
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.445.897.665.318,00	4.552.636.524.910,61	102,40%	4.033.867.901.443,28	102,02%
4.1.01	Pajak Daerah	2.890.535.400.000,00	3.165.244.493.672,00	109,50%	2.805.983.839.344,00	107,43%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.103.452.722.060,00	1.192.428.273.392,61	108,06%	125.780.223.025,00	83,33%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	77.598.507.685,00	79.014.844.959,00	101,83%	76.240.907.549,00	99,95%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	374.311.035.573,00	115.948.912.887,00	30,98%	1.025.862.931.525,28	92,01%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	6.349.050.023.208,00	6.284.768.009.600,00	98,99%	5.691.706.034.538,00	97,62%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.108.720.763.000,00	5.091.008.626.974,00	99,65%	4.501.676.725.647,00	98,26%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.240.329.260.208,00	1.193.759.382.626,00	96,25%	1.190.029.308.891,00	95,30%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	72.815.967.996,00	41.581.646.462,00	57,11%	13.988.777.564,00	108,02%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	72.815.967.996,00	41.581.646.462,00	57,11%	13.988.777.564,00	108,02%
	Jumlah Pendapatan Daerah	10.867.763.656.522,00	10.878.986.180.972,60	100,10%	9.739.562.713.545,28	99,41%

3.2.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, aset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kabupaten Bogor pada tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah kabupaten Bogor. Skala pengukuran ordinal rata-rata

capaian indikator output adalah 100% dari target 100% masuk katagori "sangat berhasil".

3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai, baik secara fisik maupun keuangan.

Kinerja BPKAD kabupaten Bogor telah melampaui target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah secara intensif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas	Ketepatan Penetapan APBD	100 %	95.16	4.84
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	100 %	99.37	0.63
2.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi	100 %	97.17	2.83

Dari dua Sasaran strategis, terdapat dua sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran Untuk indicator kinerja "Ketepatan Penetapan APBD" 6.82% dan "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi"

0.63%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan untuk semua program.

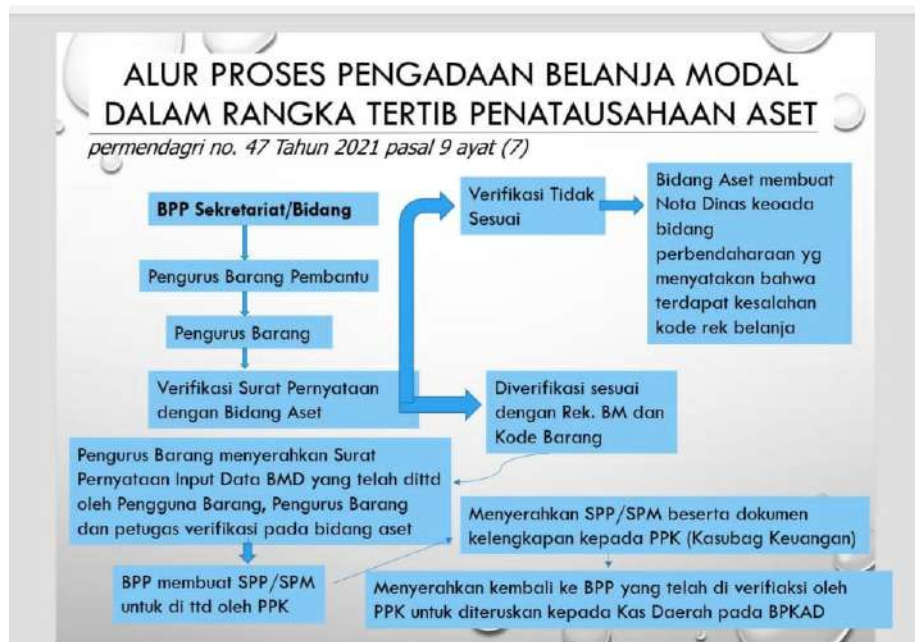
2. Sasaran

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah mencapai kineja 100% dengan efisiensi anggaran 2.83%

3.2.7 Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja

A. Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISIBADA)

Dalam rangka pencapaian target kinerja, BPKAD melakukan inovasi terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Daerah. Sistem Informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang milik daerah secara online untuk seluruh SKPD yang disebut ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah).



Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, ATISISBADA memiliki beberapa fungsi yang dapat mendukung dalam pengelolaan Aset daerah diantaranya:

1. Modul PKB (Perencanaan Kebutuhan Barang) merupakan modul yang berfungsi untuk membantu membuat catatan data rencana kebutuhan barang yang berfungsi sebagai pencatatan pembelian suatu aset barang baik itu pengadaan barang ataupun pemeliharaan pada barang yang dimana akan dilakukan pada masa mendatang. Terdapat juga RKBMD (Rencana Kerja Barang Milik Daerah) Kuasa Pengguna dan Pengguna.

2. Modul penatausahaan merupakan Modul yang berfungsi untuk pendaftaran, pencatatan, pembukuan dan inventarisasi barang di dalam Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB) serta Rekapitulasi Barang Inventaris.
3. Modul Pemanfaatan merupakan Modul ini merupakan modul yang berguna untuk membuat data pemanfaatan dari barang yang sudah tidak terpakai.
4. Modul Penyusutan merupakan merupakan modul yang berguna untuk menyusutkan harga barang berdasarkan dari tahun perolehan barang tersebut.
5. Modul Pelaporan merupakan modul sistem pelaporan yang dibutuhkan oleh neraca daerah setiap tahun. Barang-barang yang ada pada modul ini berasal dari modul penatausahaan yang disajikan berdasarkan nilai intrakomtable.
6. Modul Inventaris merupakan buku pencatatan semua barang inventaris yang sudah dimiliki oleh suatu kantor atau satuan organisasi di lingkungannya, dan sekaligus merupakan sumber informasi yang diandalkan mengenai segala macam data yang diperlukan tentang barang-barang inventaris milik daerah dalam unit pemakaian.
7. Modul Pemeliharaan Modul pemeliharaan (Pengamanan, Pemeliharaan) merupakan modul yang berisikan seluruh data barang pemeliharaan dari modul pengadaan.

Sebagai evidence dari inovasi yang mendukung pencapaian Kinerja, dokumen ATISISBADA , terlampir.

B. Sistem Penilaian Kinerja Keuangan dan Aset (SIPERJAKA)



Sistem Penilaian Kinerja Keuangan dan Aset (SIPERJAKA) Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah dalam proses penilaian kinerja keuangan dan aset pada setiap OPD di Kabupaten Bogor.

Sebagai evidence dari inovasi yang mendukung pencapaian Kinerja, dokumen SIPERJAKA , terlampir.

3.2.8 Kolaborasi lintas sektor

Dalam melaksanakan program dan kegiatan BPKAD melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya:

Pada program pengelolaan keuangan daerah, untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan Keuangan serta pengelolaan Aset, BPKAD melibatkan SKPD lain diantaranya:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) terkait Perencanaan Anggaran
2. Inspektorat, terkait Review RKA, DPA, RENSTRA, RENJA
3. Sekretariat Dewan, terkait Pembahasan KUA PPAS, RAPBD
4. Sekretariat Daerah (Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi) terkait Regulasi Pemerintahan Daerah dan Evaluasi Kinerja.
5. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait Pendapatan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait Data Kepegawaian (Gaji dan Tunjangan Pegawai)
7. Bank Jabar dan Bank BRI dalam hal pengelolaan kas daerah
8. BUMD dalam hal pencapaian target deviden
9. BPKAD Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi Gubernur terhadap RAPBD, Bantuan Keuangan provinsi dan Arah Kebijakan Provinsi

3.3 Realisasi Anggaran

Dari pengukuran capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor telah mencapai nilai Target yang ditentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja.

Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.760.981.431.276,00 dan telah terserap sebesar Rp 1.746.792.485.453,00 atau sebesar **99,19 %** dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 54.301.522.417,00 terealisasi sebesar Rp 51.165.953.135,00 atau terserap sebesar 94,23 % sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 3.135.569.282,00 atau sebesar 5,77%, yang berasal dari efisiensi gaji dan tunjangan serta dari tambahan penghasilan.
2. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 9.654.502.689,00 terealisasinya sebesar Rp 9.307.040.644,00 atau terserap sebesar 96,40 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 347.462.045,00 atau sebesar 3,60%;
3. Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 34.889.316.695,00 terealisasi sebesar Rp 32.871.783.832,00 atau terserap sebesar 94,22 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.017.532.863,00 atau sebesar 5,78 %;
4. Anggaran Belanja Transfer sebesar Rp 1.662.136.089.475,00 terealisasi sebesar Rp 1.653.447.707.842,00 atau terserap sebesar 99,48 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 8.688.381.633,00 atau sebesar 0,52 %.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan akuntabilitas kinerja seperti tersebut diatas, dan target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai, seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3.9 Tabel Rincian Realisasi Belanja BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan(Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
1	2	3			4			
URUSAN : PENUNJANG								
BIDANG URUSAN : KEUANGAN								
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda APBD Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor beserta Perbup Penjabarannya	100,00	Tepat /Tidak Tepat Waktu	1.708.954.194.861,00	100,00	1.697.745.912.722,54	100,00	99,34
	2. Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	99,00	%		99,00		100,00	
	3. Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00	Tepat /Tidak Tepat Waktu		100,00		100,00	
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Anggaran Keuangan Daerah yang sesuai standar	100,00	%	7.476.051.521,00	97,54	7.113.892.872,34	97,54	95,16
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	Dokumen	526.949.507,00	1,00	509.616.000,00	100,00	96,71
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	Dokumen	525.392.176,00	1,00	515.571.000,00	100,00	98,13

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	261.678.854,00	72,00	260.659.000,00	100,00	99,61
Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	72	Dokumen	171.719.456,00	72,00	169.528.000,00	100,00	98,72
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	1.889.201.388,00	2,00	1.798.030.480,00	100,00	95,17
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	2.153.199.392,00	2,00	2.026.879.000,00	100,00	94,13
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	50	Dokumen	1.027.767.922,00	45,00	936.441.232,00	90,00	91,11
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Dokumen	92.505.767,00	1,00	90.841.500,00	100,00	98,20
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Dokumen	252.131.036,00	1,00	241.641.388,00	100,00	95,84
Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Dokumen	575.506.023,00	1,00	564.685.272,34	100,00	98,12
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah	100,00	%	1.979.607.056,00	100,00	1.875.765.652,76	100,00	94,75
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	490.337.054,00	12,00	454.139.658,24	100,00	92,62
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	500	Dokumen	281.061.649,00	500,00	251.759.019,88	100,00	89,57

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	268.702.476,00	1,00	259.880.186,16	100,00	96,72
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	290.430.778,00	12,00	275.309.010,00	100,00	94,79
Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6	Dokumen	233.475.582,00	6,00	231.267.452,00	100,00	99,05
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1	Dokumen	206.793.652,00	1,00	199.938.800,00	100,00	96,69
Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	59.115.371,00	1,00	58.231.526,48	100,00	98,50
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	149.690.494,00	72,00	145.240.000,00	100,00	97,03
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi standar	100,00	%	1.293.400.864,00	100,00	1.254.134.412,44	100,00	96,96
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1	Laporan	212.539.270,00	1,00	208.887.838,56	100,00	98,28
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	Laporan	325.245.197,00	19,00	311.488.121,00	100,00	95,77

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	Laporan	89.999.663,00	1,00	89.697.559,00	100,00	99,66
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	179.999.765,00	2,00	179.561.019,00	100,00	99,76
Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	102.769.359,00	1,00	101.686.340,00	100,00	98,95
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12	Dokumen	90.380.567,00	12,00	82.084.193,60	100,00	90,82
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	1	Dokumen	157.499.200,00	1,00	147.946.841,28	100,00	93,93
Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	134.967.843,00	72,00	132.782.500,00	100,00	98,38
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D Bantuan Keuangan yang tepat waktu	100,00	%	1.697.025.406.170,00	100,00	1.686.353.127.206,00	100,00	99,37
Sub Kegiatan Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1	Laporan	1.412.170.273.110,00	1,00	1.405.064.721.493,00	100,00	99,50
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	34.889.316.695,00	1,00	32.881.048.832,00	100,00	94,24

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1	Laporan	249.965.816.365,00	1,00	248.407.356.881,00	100,00	99,38
Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase data dan informasi yang akurat dan mutakhir	100,00	%	1.179.729.250,00	100,00	1.148.992.579,00	100,00	97,39
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	83.148.466,00	1,00	82.388.486,00	100,00	99,09
Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	516.451.603,00	1,00	513.088.910,00	100,00	99,35
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	580.129.181,00	72,00	553.515.183,00	100,00	95,41
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Barang Milik Daerah dengan Baik	90,00	%	3.534.734.785,00	90,00	3.375.854.141,00	100,00	95,51
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Penatausahaannya tepat waktu	90,00	%	3.534.734.785,00	90,00	3.375.854.141,00	100,00	95,51
Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	Dokumen	221.253.096,00	2,00	211.522.768,00	100,00	95,60
Sub Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	92.617.359,00	1,00	87.834.784,00	100,00	94,84
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	202.944.887,00	2,00	201.794.034,00	100,00	99,43
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	238.657.481,00	1,00	234.421.504,00	100,00	98,23

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	104.959.301,00	1,00	97.604.944,00	100,00	92,99
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Laporan	498.731.642,00	1,00	474.837.426,00	100,00	95,21
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	280.936.089,00	2,00	269.326.450,00	100,00	95,87
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	301.575.408,00	1,00	243.394.568,00	100,00	80,71
Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	326.427.750,00	1,00	309.540.414,00	100,00	94,83
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	Laporan	157.219.397,00	2,00	156.938.309,00	100,00	99,82
Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	298.367.945,00	2,00	295.077.655,00	100,00	98,90
Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72	Orang	811.044.430,00	72,00	793.561.285,00	100,00	97,84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP BPKAD	BB	Kategori	48.492.501.630,00	0,00	45.670.718.589,46	100,00	94,18
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan	100,00	%	814.938.716,00	100,00	794.627.014,00	100,00	97,51
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	134.681.571,00	9,00	128.028.730,00	100,00	95,06

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	40.352.865,00	1,00	39.340.500,00	100,00	97,49
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	31.951.411,00	1,00	31.207.000,00	100,00	97,67
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	51.716.795,00	1,00	50.502.000,00	100,00	97,65
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	53.093.723,00	1,00	52.357.000,00	100,00	98,61
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan	140.963.253,00	7,00	138.027.784,00	100,00	97,92
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	17	Laporan	362.179.098,00	17,00	355.164.000,00	100,00	98,06
Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100,00	%	28.211.311.803,00	100,00	27.193.762.481,00	100,00	96,39
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97	Orang/Bulan	27.742.272.580	97,00	26.763.630.859,00	100,00	96,47
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	194.336.666	1,00	192.413.132,00	100,00	99,01
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	38.006.539	1,00	36.978.296,00	100,00	97,29
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	48.433.158	2,00	47.716.720,00	100,00	98,52

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24	Laporan	156.234.642	24,00	121.716.886,00	100,00	77,91
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	32.028.218	2,00	31.306.588,00	100,00	97,75
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat lingkup BPKAD	100,00	%	137.177.749,00	100,00	135.848.028,00	100,00	99,03
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	15.982.474	1,00	15.869.696,00	100,00	99,29
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	107.968.677	1,00	106.841.200,00	100,00	98,96
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	13.226.598	1,00	13.137.132,00	100,00	99,32
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100,00	%	625.068.692,00	99,26	563.938.444,00	99,26	90,22
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	17.973.791	1,00	15.135.944,00	100,00	84,21
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	29.954.688	1,00	27.657.500,00	100,00	92,33
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	97	Dokumen	27.140.213,00	97,00	25.170.000,00	100,00	92,74
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kerjasama dan disiplin pegawai	20	Orang	100.000.000,00	18,00	46.500.000,00	90,00	46,50
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	Orang	450.000.000,00	150,00	449.475.000,00	100,00	99,88

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan administrasi umumnya	100,00	%	7.835.092.542,00	100,00	7.032.516.090,00	100,00	89,76
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	186.218.262,00	1,00	180.239.000,00	100,00	96,79
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Paket	5.011.731.435,00	9,00	4.875.119.500,00	100,00	97,27
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	209.359.995,00	6,00	179.769.000,00	100,00	85,87
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	302.735.850,00	2,00	297.310.000,00	100,00	98,21
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	138.960.000,00	1,00	137.695.000,00	100,00	99,09
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	122.500.000,00	12,00	107.068.000,00	100,00	87,40
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	1.863.587.000,00	12,00	1.255.315.590,00	100,00	67,36
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya	100,00	%	6.248.290.093,00	97,14	5.901.883.000,00	97,14	94,46
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Roda 4 dan Roda 2)	28	Unit	6.104.980.000,00	27,00	5.768.750.000,00	96,43	94,49
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	26.044.060,00	1,00	24.540.000,00	100,00	94,22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	117.266.033,00	6,00	108.593.000,00	100,00	92,60
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja lingkup BPKAD yang terlayani jasa penunjang	100,00	%	2.577.406.769,00	100,00	2.157.274.279,46	100,00	83,70
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	239.224.864,00	12,00	238.077.224,00	100,00	99,52
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.152.093.596,00	12,00	894.522.701,00	100,00	77,64
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.186.088.309,00	12,00	1.024.674.354,46	100,00	86,39
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana lingkup BPKAD dalam kondisi baik	100,00	%	2.043.215.266,00	96,15	1.890.869.253,00	96,15	92,54
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Kendaraan Roda 4)	15	Unit	167.000.000,00	14,00	120.597.866,00	93,33	72,21
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	133	Unit	520.750.000,00	128,00	436.057.100,00	96,24	83,74
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeulair Yang Terpelihara		Unit					
Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	Unit	140.000.000,00	2,00	139.400.000,00	100,00	99,57

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
		K	S	Rp.	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	507.421.880,00	3,00	500.842.161,00	100,00	98,70
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	476.393.386,00	1,00	464.490.426,00	100,00	97,50
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	231.650.000,00	2,00	229.481.700,00	100,00	99,06
Jumlah :				1.760.981.431.276,00		1.746.792.485.453,00		99,19

Pencapaian secara keseluruhan pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien, hal tersebut dapat dilihat dari anggaran Belanja dan capaian realisasi dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi sebesar 98.01%, dan capaian Fisik rata-rata 100.00%.

3.3.1 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 2 sasaran tersebut, tingkat efisiensinya yaitu:

Dari tabel diatas dapat dianalisis efisiensi sebagai berikut :

- Efisiensi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi berasal dari adanya efisiensi gaji dan tunjangan, dari tambahan penghasilan, akses untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, belum disalurkannya iuran BPJS bagi sertifikasi guru.
- Efisiensi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi berasal dari efisiensi pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa karena disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Efisiensi Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi berasal dari efisiensi belanja bahan cetak, alat bahan komputer, belanja makanan minuman rapat/ jamuan, dan honorarium jasa narasumber/ tenaga ahli.
- Efisiensi Belanja Modal pada Belanja Modal berasal dari efisiensi belanja modal pengadaan peralatan komputer, belanja modal kendaraan dinas, belanja alat kantor dan rumah tangga, belanja tanda batas/ tugu, serta belanja BM Software (spek penyedia BM Software).
- Adapun beberapa sisa anggaran itu merupakan sisa hasil penawaran barang/jasa, sisa dari kegiatan yang telah selesai, serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BPKAD Kabupaten Bogor sesuai tujuan pencapaian kinerja terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel. Selaras dengan tugas dan fungsinya BPKAD yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor, yang berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bogor serta pencapaiannya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2024 menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dicapai yaitu dari 3 Indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain karena adanya komitmen pimpinan dan dukungan jajaran staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor tahun 2024 telah merealisasikan capaian target yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPB) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian kinerja sasaran strategis 1; Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- a. Ketepatan Penetapan APBD dengan target Tepat Waktu realisasi Tepat Waktu atau sebesar 100 % ;
- b. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi Realisasi 93.06% menunjukkan bahwa dari 72 SKPD, 67 SKPD telah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang berarti hampir 93% dari SKPD yang ada berhasil memenuhi kriteria kepatuhan.

Capaian 103.8% menunjukkan bahwa pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan, yakni 90.28%. Hal ini menggambarkan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan, dengan pencapaian lebih dari 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran strategis 2; Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi, Target tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 90.28%. Dari 72 SKPD, sebanyak 62 SKPD telah memenuhi kepatuhan, sehingga realisasi yang diperoleh adalah 86.11%. Dengan menggunakan rumus capaian, diperoleh nilai 95.38%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang dicapai mencapai 95.38% dari target yang telah ditetapkan.

Meskipun realisasi belum mencapai 90.28%, capaian yang diperoleh tetap tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD telah mematuhi kebijakan yang ditetapkan.

Anggaran Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.760.981.431.276,00 dan telah terserap sebesar Rp 1.746.792.485.453,00 atau sebesar 99,19 % dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 54.301.522.417,00 terealisasi sebesar Rp 51.165.953.135,00 atau terserap sebesar 94,23 % sehingga

terdapat efisiensi sebesar Rp 3.135.569.282,00 atau sebesar 5.77%, yang berasal dari efisiensi gaji dan tunjangan serta dari tambahan penghasilan.

- Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 9.654.502.689,00 terealisasinya sebesar Rp 9.307.040.644,00 atau terserap sebesar 96,40 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 347.462.045,00 atau sebesar 3,60%;
- Anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 34.889.316.695,00 terealisasi sebesar Rp 32.871.783.832,00 atau terserap sebesar 94,22 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.017.532.863,00 atau sebesar 5,78 %;

4.2 Saran

Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja tahun 2024 dan pada tahun berikutnya, BPKAD Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Solusi terkait dengan Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - Melakukan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
 - Melakukan pembinaan dan pendampingan perencanaan anggaran kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran sesuai perencanaan, tepat waktu, efisiensi dan efektif;
 - Meningkatkan evaluasi dan optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan daerah (aplikasi SIPD);
 - Melaksanakan evaluasi transaksi non-tunai untuk mendukung transparansi keuangan daerah;
 - Melakukan verifikasi dan review berkala dengan Perangkat daerah untuk Rekonsiliasi laporan SPJ Fungsional;
 - Dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dilakukan rekonsiliasi secara berkala dengan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Tepat Waktu;

- b) Solusi terkait dengan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :
 - Meningkatkan Koordinasi dan Pendampingan bagi Pengurus barang PD, dalam perencanaan kebutuhan BMD, dan peran Kepala PD selaku pengguna dalam pengelolaan BMD;
 - Penyampaian laporan pengadaan belanja modal dalam aplikasi ATISISBADA merupakan salah satu syarat dalam ajuan pencairan SP2D Perangkat Daerah;
 - Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pengurus Barang dalam melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dengan tertib dan baik;

- Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis, urusan penerbitan alas hak atas tanah-tanah yang belum memiliki Sertipikat dengan penyusunan SK penetapan atas Tanah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor dengan kerjasama pihak ketiga (masyarakat) melalui sewa, pinjam, pakai serta kerja sama pemanfaatan aset (BOT) bangun guna serah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2023 beserta Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
3. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Ketepatan Penetapan APBD terkait sosialisasi kebijakan dengan contoh evidence berupa "Laporan Hasil Sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025"
4. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi" berupa:
 - Rapat Renstra Perubahan
 - Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024
 - Koordinasi terkait Evidence RB BPKAD 2024
 - Rapat Evaluasi Kinerja TW I, II, III, dan IV Tahun 2024
 - Rework dan punishment pada kegiatan Pemeringkatan melalui Aplikasi Siperjaka
5. Dokumen pelaksanaan optimalisasi kegiatan Pengelolaan keuangan yang terkait dengan IKU "Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tinggi" berupa:
 - Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Rekonsiliasi Data BMD
 - Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Data Aset
 - Rework dan punishment pada kegiatan Pemeringkatan melalui Aplikasi Siperjaka
6. Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (ATISISBADA) sebagai inovasi yang mendukung pencapaian Kinerja.
7. Sistem Penilaian Kinerja Keuangan dan Aset (SIPERJAKA) sebagai inovasi yang mendukung pencapaian Kinerja.

LINK GOOGLE DRIVE

<https://drive.google.com/drive/folders/1WTUT4Whl-6tcbnVF1yosgPC8PV2oPJZM>



KELOMPOK SUBSTANSI PROGRAM DAN PELAPORAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR

